



**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : SK.869/Menhut-II/2014

TENTANG

**KAWASAN HUTAN DAN KONSERVASI PERAIRAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 50/Kpts-VII/1987 tanggal 25 Februari 1987, telah ditunjuk areal hutan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah seluas ± 5.176.672 (lima juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua) hektar;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 757/Kpts-II/1999 tanggal 23 September 1999 telah ditunjuk kawasan hutan di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah seluas ± 4.394.932 (empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua) hektar, hasil paduserasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Tengah dengan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.635/Menhut-II/2013 tanggal 24 September 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.708/Menhut-II/2014 tanggal 22 Agustus 2014, ditetapkan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 94.759 (sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh sembilan) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 42.788 (empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 91 (sembilan puluh satu) hektar di Provinsi Sulawesi Tengah, dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan surat Menteri Kehutanan Nomor S.579/Menhut-II/2013 tanggal 26 September 2013, kepada Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia / Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan, mohon persetujuan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS) seluas ± 15.312 (lima belas ribu tiga ratus dua belas) hektar, di Provinsi Sulawesi Tengah, yang berasal dari Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam seluas ± 5.510 (lima ribu lima ratus sepuluh) hektar dan Kawasan Hutan Lindung seluas ± 9.802 (sembilan ribu delapan ratus dua) hektar;
- e. bahwa berdasarkan surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia / Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Nomor PW/09502/DPR RI/IX/2014 tanggal 24 September 2014 menyampaikan hasil Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kehutanan mengenai usulan perubahan peruntukan kawasan hutan dalam Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, Pimpinan DPR RI memutuskan meneruskan surat Pimpinan Komisi IV DPR RI Nomor 122/Kom IV/DPR RI/IX/2014 tanggal 22 September 2014, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan dinamika pembangunan dan optimalisasi fungsi kawasan hutan, sebagian kawasan hutan yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, telah dilakukan perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial;
- g. bahwa dalam rangka pengukuhan kawasan hutan, sebagian kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, telah dilakukan penataan batas dan/atau penetapan kawasan hutan;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
17. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2014;

18. Peraturan ...

18. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
19. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 757/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah seluas ± 4.394.932 (empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua) hektar;
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2010 tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012;
22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013;
23. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.635/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 94.759 (sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh sembilan) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 8.409 (delapan ribu empat ratus sembilan) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 91 (sembilan puluh satu) hektar di Provinsi Sulawesi Tengah;
24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/Menhut-II/2014 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan;
25. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.708/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.635/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 94.759 (sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh sembilan) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 8.409 (delapan ribu empat ratus sembilan) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 91 (sembilan puluh satu) hektar di Provinsi Sulawesi Tengah;

Memperhatikan : ...

- Memperhatikan:
1. Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 650/335/Dis PU tanggal 6 Mei 2010, Nomor 600/164/PUD tanggal 27 September 2011, Nomor 522/220/DISHUTDA tanggal 29 Nopember 2011, Nomor 522/271/ DISHUTDA tanggal 23 Desember 2011, Nomor 522/305/ DISHUTDA tanggal 3 Mei 2012, Nomor 522/429/ DISHUTDA tanggal 26 Juni 2012, dan Nomor 650/632/DISHUTDA tanggal 31 Desember 2013;
 2. Laporan Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;
 3. Surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia / Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Nomor PW/09502/DPR RI/IX/2014 tanggal 24 September 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG KAWASAN HUTAN DAN KONSERVASI PERAIRAN PROVINSI SULAWESI TENGAH.**

- KESATU : Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Tengah seluas \pm 4.274.687 (empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tujuh) hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut:
- a. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), seluas \pm 988.493 (sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tiga) hektar, terdiri dari:
 1. Daratan, seluas \pm 648.374 (enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat) hektar;
 2. Perairan, seluas \pm 340.119 (tiga ratus empat puluh ribu seratus sembilan belas) hektar;
 - b. Kawasan Hutan Lindung (HL), seluas \pm 1.276.087 (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan puluh tujuh) hektar;
 - c. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), seluas \pm 1.390.971 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) hektar;
 - d. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), seluas \pm 401.814 (empat ratus satu ribu delapan ratus empat belas) hektar;
 - e. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), seluas \pm 217.322 (dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh dua) hektar.
- KEDUA : Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, sebagaimana tergambar pada Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.

KETIGA : ...

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan, maka:

- a. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 757/Kpts-II/1999 tanggal 23 September 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah seluas ± 4.394.932 (empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua) hektar;
- b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.635/Menhut-II/2013 tanggal 24 September 2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 94.759 (sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh sembilan) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 8.409 (delapan ribu empat ratus sembilan) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 91 (sembilan puluh satu) hektar di Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.708/Menhut-II/2014 tanggal 22 Agustus 2014;

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2014

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,**



KRISNA RYA

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Menteri Pertanian.
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
5. Menteri Perhubungan.
6. Menteri Pekerjaan Umum.
7. Menteri Lingkungan Hidup.
8. Menteri Perencanaan Pembangunan / Kepala BAPPENAS.
9. Kepala Badan Pertanahan Nasional.
10. Kepala Badan Informasi Geospasial.
11. Gubernur Sulawesi Tengah.
12. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Kehutanan.
13. Seluruh Bupati/Walikota di Provinsi Sulawesi Tengah.
14. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
15. Seluruh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan di Provinsi Sulawesi Tengah.
16. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu.

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

ZULKIFLI HASAN



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN
JAKARTA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN

NOMOR : SK. 49 /PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022

TENTANG
PENETAPAN PETA DAN DATA
LAHAN KRITIS NASIONAL TAHUN 2022

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan diminta menyusun peta lahan kritis Nasional tahun 2022;

b. bahwa dalam penyerahan peta dan data lahan kritis Nasional tahun 2022 kepada Sekretariat Kebijakan Satu Peta diperlukan pengesahan dari Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan;

c. bahwa dalam rangka pengesahan peta dan data lahan kritis Nasional tahun 2022, perlu ditetapkan peta dan data lahan kritis Nasional tahun 2020 dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan, yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Luas Lahan Kritis Nasional Tahun 2022 adalah 12.744.925 Ha, dengan rincian sebagai berikut :
- Dalam Kawasan Hutan seluas 7.410.751 Ha
 - Di luar Kawasan Hutan seluas 5.334.174 Ha
- KETIGA : Peta dan Data Lahan Kritis Nasional Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA menjadi acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat dalam penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan. Detail luas Lahan Kritis 2022 per wilayah kerja BPDAS dan batas administrasi provinsi sebagaimana lampiran surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 27 Desember 2022



MARDYAH MURTININGSIH, M.HUM
NIP. 19690802 199803 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Pejabat Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan
4. Kepala Balai Pengelolaan DAS seluruh Indonesia

- KEDUA : Luas Lahan Kritis Nasional Tahun 2022 adalah 12.744.925 Ha, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Dalam Kawasan Hutan seluas 7.410.751 Ha
 - b. Di luar Kawasan Hutan seluas 5.334.174 Ha
- KETIGA : Peta dan Data Lahan Kritis Nasional Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA menjadi acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat dalam penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan. Detail luas Lahan Kritis 2022 per wilayah kerja BPDAS dan batas administrasi provinsi sebagaimana lampiran surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 27 Desember 2022

DIREKTUR JENDERAL,

**Jr. DYAH MURTININGSIH, M.HUM
NIP. 19690802 199803 2 001**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Pejabat Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan
4. Kepala Balai Pengelolaan DAS seluruh Indonesia

Lampiran I.

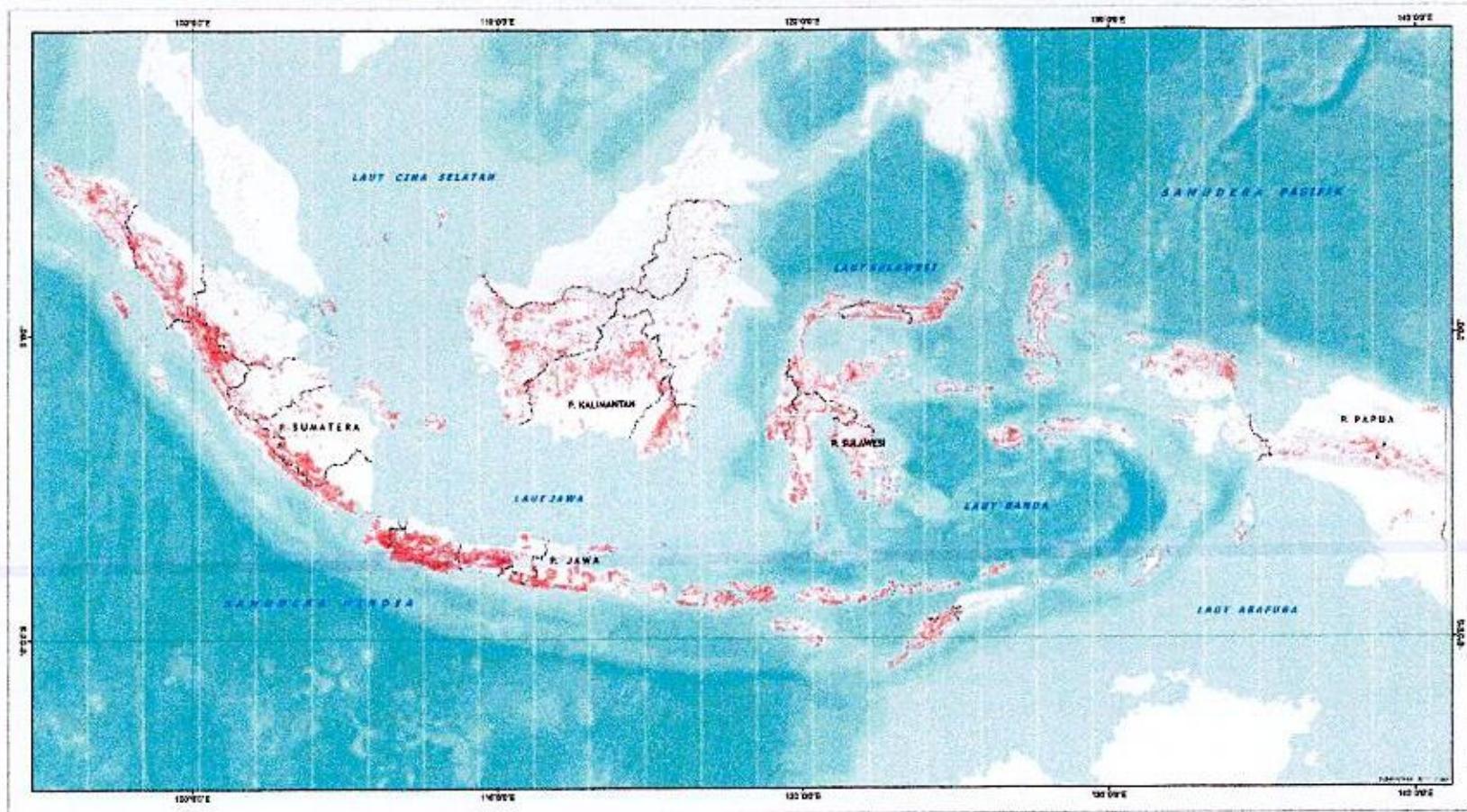
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN DAS DAN REHABILITASI HUTAN

NOMOR : SK.49/PPAS.RH/PPP.PAS/DAS.0/12/2022

TANGGAL : 27 Desember 2022

TENTANG : PENETAPAN PETA DAN DATA LAHAN KRITIS NASIONAL TAHUN 2022

PETA LAHAN KRITIS NASIONAL TAHUN 2022



KETEBALAN
Batas Provinsi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan

DOKUMEN PETA:
1. Data Penetapan Lahan Kritis Nasional yang dilengkapi dengan Rincian Detil
2. Data Penetapan Lahan Kritis Nasional yang dilengkapi dengan Rincian Detil dan Nama Pemilik
3. Data Penetapan Lahan Kritis Nasional yang dilengkapi dengan Rincian Detil dan Nama Pemilik
4. Data Detil Lahan Kritis Nasional yang dilengkapi dengan Nama Pemilik

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN DAS DAN REHABILITASI HUTAN

S. INAH MAMINTAHINNE, M.SUM
NIP.19620201.00100.7.01

WILAYAH JENDERAL PENGELOLAAN DAS DAN REHABILITASI HUTAN
KEMENTERIAN LITERASI DAN KERAKYATAN
322

Lampiran II.

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN DAS DAN REHABILITASI HUTAN
NOMOR : SK. 49 /PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022
TANGGAL : 27 Desember 2022
TENTANG : PENETAPAN PETA DAN DATA LAHAN KRITIS NASIONAL
TAHUN 2022

LUAS LAHAN KRITIS PER WILAYAH KERJA BPDAS

No.	BPDAS	LUAS LAHAN KRITIS (HA)
1	Krueng Aceh	334,423
2	Wampu Sei Ular	248,886
3	Asahan Barumun	560,645
4	Agam Kuantan	151,125
5	Indragiri Rokan	725,351
6	Batanghari	257,503
7	Musi	722,280
8	Ketahun	274,616
9	Way Seputih Sekampung	392,366
10	Baturusa Cerucuk	167,065
11	Sejang Duriangkang	92,573
12	Citarum Ciliwung	814,543
13	Cimanuk Citanduy	254,119
14	Pemali Jratun	146,768
15	Serayu Opak Progo	245,230
16	Solo	125,072
17	Brantas Sampean	296,034
18	Unda Anyar	41,417
19	Dodokan Moyosari	490,314
20	Benain Noelmina	580,731
21	Ake Malamo	483,268
22	Waehapu Batu Merah	487,248
23	Memberamo	361,404
24	Remu Ransiki	338,261
25	Kapuas	716,396
26	Barito	819,799
27	Kahayan	486,401
28	Mahakam Berau	327,706
29	Karama	134,785
30	Jeneberang Saddang	394,783
31	Bone Bolango	228,160
32	Sampara	312,535
33	Tondano	359,942
34	Palu Poso	373,177
	JUMLAH	12,744,925

Lampiran III.

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN DAS DAN REHABILITASI HUTAN
NOMOR : SK. 49 /PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022
TANGGAL : 27 Desember 2022
TENTANG : PENETAPAN PETA DAN DATA LAHAN KRITIS NASIONAL
TAHUN 2022

LUAS LAHAN KRITIS PER PROVINSI

NO	PROVINSI	LUAS LAHAN KRITIS (HA)
1	Aceh	389,332
2	Sumatera Utara	777,942
3	Sumatera Barat	686,091
4	Riau	221,828
5	Kepulauan Riau	92,573
6	Jambi	219,632
7	Bengkulu	277,708
8	Sumatera Selatan	707,169
9	Lampung	387,494
10	Kepulauan Bangka Belitung	167,065
11	Banten	197,629
11	DKI Jakarta	-
12	Jawa Barat	829,556
13	Jawa Tengah	392,269
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	72,294
15	Jawa Timur	390,017
16	Kalimantan Barat	743,784
17	Kalimantan Selatan	458,478
18	Kalimantan Tengah	819,682
19	Kalimantan Timur	274,477
20	Kalimantan Utara	53,881
21	Sulawesi Utara	362,594
22	Gorontalo	225,438
23	Sulawesi Tengah	364,104
24	Sulawesi Barat	144,130
25	Sulawesi Selatan	392,797
26	Sulawesi Tenggara	314,318
27	Bali	41,417
28	Nusa Tenggara Barat	490,314
29	Nusa Tenggara Timur	580,731
30	Maluku	487,248
31	Maluku Utara	483,268
33	Papua Barat	331,028
34	Papua	368,637
JUMLAH		12,744,925

Lampiran Indikator Kinerja Kunci (IKK)

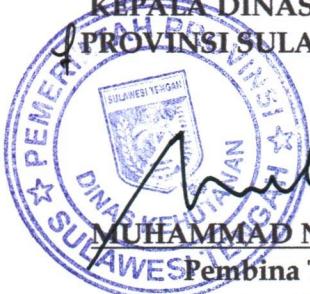
KEHUTANAN

3.d.1	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yg diberikan akses legal		Definisi Operasional : Mengukur peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial
		----- x 100%		Keterangan :
		jumlah total usulan KTH yang terintegrasi		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan
			188 218	<ul style="list-style-type: none"> 100%
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelompok Tani Hutan (KTH) adalah kumpulan petani warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Akses legal adalah pemberian IUPHKm dan IUPHHK-HTR kepada Kelompok Tani Hutan
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.
3.d.2	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi)	Jumlah hutan yang rusak		Definisi Operasional : Mengukur tingkat kerusakan hutan per tahun (deforestasi)
		----- x 100%		
		Jumlah hutan keseluruhan		
		1,505.5		
		4,274,687.0	100%	
		0.00035		
				Keterangan :
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kerusakan hutan (deforestasi) adalah perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.
3.d.3	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Luas lahan kritis di provinsi yang direhabilitasi (ha)		Definisi Operasional : Mengukur tingkat rehabilitasi luas lahan kritis
		----- x 100%		Keterangan :
		Luas Lahan Kritis di provinsi (ha)		
		371,497		
		364,104	100%	
		1.02		

			<ul style="list-style-type: none"> Lahan kritis adalah lahan yang berada di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air DAS
			<ul style="list-style-type: none"> Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

Mengetahui,

**KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



MUHAMMAD NENG, ST.,MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19691125 200112 1002



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS KEHUTANAN

Jalan S. Parman Nomor 9 Telepon 421260 Fax. 426860 Palu

Email : dishut@sulteng.go.id Website : www.dishut.sultengprov.go.id

Permohonan HKm yang Sudah Diverifikasi Teknis namun Belum Terbit SK sd 31 Desember 2023

No	KPH	Lokasi / Desa & Kecamatan	No. BA	Tanggal	Luas Usulan	Fungsi Kawasan	Skema PS	Luas Setelah Vertek	Rekomendasi		Pendamping KPH / Nama LSM	Keterangan Hasil Vertek	KTH	Ket.
									Diterima	Ditolak				
1	KPH Gunung Dako	Desa Banangan Kec. Dampal utara Kab. Tolitoli	BA.23/X-4/BPSKL.2/VER/03/2023	11-Mar-23	140	HPT	HKm	140	*		KPH Gn Dako	dapat dilanjutkan seluruhnya karena sudah ada pemanfaatan berupa agroforestry, serta pemungutan HHBK berupa penyadapan aren dan rotan	KTH banangan mandiri	BELUM ADA SK
2	KPH Tepo Asa Aroa	Desa Ronta Kec. Lembo Tengah Kab. Morowali Utara	BA.29/X-3/BPSKL-2/VER/5/2023	19-Mei-23	146	HPT	HKm	137	*		KPH TAA	berkurang 16 Ha karena menyesuaikan batas areal sawit perusahaan dan bertambah 7 Ha karena menyesuaikan batas areal garapan di lapangan	KTH Sumber Latex	BELUM ADA SK
3	KPH Sivia Patuju	Desa Bongka Makmur kec. Ulu bongka kab. Tojo unauna	BA.121/X-3/BPSKL	28-Aug-23	813	HPT	HKm	813	*		KPH Sivia Patuju	dapat diterima seluruhnya karena sudah terdapat pemanfaatan kawasan berupa agroforestry (jagung, kelapa, kemiri, alpokat dll), dan pemanfaatan HHBK berupa bambu dan agrowisata. Serta anggota pemohon semula 187 KK dapat diterima 221 KK (215 Laki, 6 perempuan).	HKM Harapan Lestari	BELUM ADA SK
4	KPH Sivia Patuju	Desa Bone Bae II Kec. Ulu bongka Kab, Tojo Unauna	BA.122/X-3/BPSKL-II/PSL.0/8/2023	28-Aug-23	415	HPT	HKm	429	*		KPH Sivia Patuju	dapat diterima seluas 429 Ha, bertambah 14 Ha karena penyesuaian batas kawasan hutan dan lahan garapan serta terdapat pemanfaatan berupa agroforestry dan silvopasture. Serta anggota pemohon semula berjumlah 52 KK diterima sebanyak 54 KK	KTH Palopi	BELUM ADA SK
5	KPH Sivia Patuju	Desa Marowo Kec. Ulubongka Kab. Tojo Unauna	BA. 123/X-3/BPSKL-II/PSL.0/8/2023	28-Aug-23	148	HP	HKm	148	*		KPH Sivia Patuju	dapat diterima seluruhnya karena sudah terdapat pemanfaatan berupa agroforestry (cengkeh, kemiri, kelapa, jati, durian, pala, dll) dan anggota pemohon semula 30 KK dapat diterima sebanyak 31 KK (laki" 28 org, perempuan 3)	KTH Uejimi	BELUM ADA SK

6	KPH Pogogul	Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol	BA.141/X-3/BPSKL-II/VER/8/2023	30-Aug-23	105.19	HP	HKm	242.8	*	KPH Pogogul	areal yg semula 105,19 Ha bertambah 137,61 menjadi 242,8 Ha karena areal yg dikelola gapotkan belum dipetakan dalam permohonan HKm pd kawasan hutan produksi	GAPOKTAN Botumeme	BELUM ADA SK
7	KPH Toili baturube	Desa Pandan Wangi Kec. Toili Barat kab. Banggai	BA.142/X-3/BPSKL-II/PSL.0/8/2023	30-Aug-23	9.2	HL	HKm	9.25	*	KPH Toili Baturube	areal yg dimohon semula 9,25 Ha dapat diterima seluas 9,20 Ha karena areal tsb direncanakan untuk pemanfaatan kawasan dgn pola silvofishery (ikan, kepiting, udang) dan pemanfaatan jasling berupa wisata, berkurang 0,05 Ha karena merupakan APL	KTH Pesona Mangrove	BELUM ADA SK
8	KPH Gunung Dako	Desa Malulu kec. Dondo kab. Tolitoli	BA.145/X-3/BPSKL-II/PSL.0/9/2023	11-Sep-23	400	HPT	HKm	400	*	KPH Gn Dako	areal dapat diterima seluruhnya karena sudah terdapat pengelolaan di lokasi usulan	KTH Mattiro Bulu	BELUM ADA SK
9	KPH Gunung Dako	Desa Salugan kec. Lampasio kab. Tolitoli	BA.152/X-3/BPSKL-II/PLS.0/9/2023	11-Sep-23	130	HL	HKm	130	*	KPH Gn Dako	dapat diterima seluruhnya karena berada diluar areal gambut, berada di dalam areal PIPPIB seluas 130 Ha dan tidak terindikasi tutupan lahan sawit	KTH Landat Jaya	BELUM ADA SK
10	KPH Gunung Dako	Desa Lampasio Kec. Lampasio Kab Tolitoli	BA.153/X-3/BPSKL-II/PSL.0/9/2023	11-Sep-23	310	HP	HKm	310	*	KPH Gn Dako	dapat diterima seluruhnya karena fakta dilapangan sudah terdapat pemanfaatan budidaya tanaman cengkeh, durian, kopi, dan silvopasture	KTH Sipamase-mase	BELUM ADA SK
11	KPH Gunung Dako	Desa Dungingis kec. Dakopamean kab. Tolitoli	BA.154/X-3/BPSKL-II/PSL.0/9/2023	11-Sep-23	200	HPT	HKm	200	*	KPH Gn Dako	dapat diterima seluruhnya karena fakta dilapangan sudah ada pemanfaatan lahan perkebunan serta potensi untuk pengembangan wisata alam dan perlindungan mata air. Dan permohonan bertambah 5 KK	KTH Simasei	BELUM ADA SK
12	KPH Gunung Dako	Desa Dadakitan Kec. Baolan kab. Tolitoli	BA.155/X-3/BPSKL-II/PSL.0/9/2023	11-Sep-23	180	HPT, HL	HKm	185	*	KPH Gn Dako	areal yg dimohon seluas 180 Ha bertambah seluas 5 Ha berdasarkan penyesuaian batas garapan masyarakat sehingga menjadi 185 Ha	KTH Jaya Mandiri	BELUM ADA SK

Mengetahui,



MUHAMMAD NENG, ST.,MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19691125 200112 1002



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS KEHUTANAN

Jalan S. Parman Nomor 9 Telepon 421260 Fax. 426860 Palu

Email : dishut@sulteng.go.id Website : www.dishut.sultengprov.go.id

JUMLAH TOTAL SK PERSETUJUAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL DI PROVINSI SULAWESI TENGAH S/D DESEMBER 2023

Nomor	KPH	TOTAL			HD			HKm			KULIN KK			HTR			HA		
		SK	LUAS	KK	SK	Luas	KK	SK	Luas	KK	SK	luas	KK	SK	Luas	KK	SK	luas	KK
1	Balantak	4	2,202.00	377	3	2,102.00	364		0	0	0	-	-	1	100.00	13	0	-	-
2	Banawa Lalundu	7	2,573.00	1,801	6	2,334.00	1,722	1	239	79	0	-	-	0	-	-	0	-	-
3	Dampelas Tinombo	12	16,643.00	4,638	10	16,218.00	4,550	2	425	88	0	-	-	0	-	-	0	-	-
4	Dolago Tanggunung	29	12,374.67	3,393	2	2,850.00	1,182	18	8910	1895	9	614.67	316	0	-	-	0	-	-
5	Kulawi	19	24,931.00	7,688	13	11,012.00	4,498	1	2630	857	0	-	-	0	-	-	5	11,289.00	2,333
6	Sintuwu Maroso	20	16,275.82	3,561	7	8,988.00	1,752	13	7287.82	1,809	0	-	-	0	-	-	0	-	-
7	Pogogul	14	5,360.00	4,779	14	5,360.00	4,779		0	0	0	-	-	0	-	-	0	-	-
8	Pulau Peling	6	4,099.00	1,121	2	1,004.00	429	4	3095	692	0	-	-	0	-	-	0	-	-
9	Sivia Patuju	44	15,063.00	5,083	12	8,866.00	3,389	6	3102	607	0	-	-	26	3,095.00	1,087	0	-	-
10	Tepe Asa Moroso	5	1,356.00	287		-	-	5	1356	287	0	-	-	0	-	-	0	-	-
11	Tepo Asa Aroa	7	2,142.00	1,018	4	1,392.00	863	3	750	155	0	-	-	0	-	-	0	-	-
12	Toili Baturube	10	8,603.32	927	3	1,891.32	513	6	500	301	0	-	-	0	-	-	1	6,212.00	113
13	Gunung Dako	11	2,147.00	1,412	2	543.00	936	9	1604	476	0	-	-	0	-	-	0	-	-
Per 31 Des 23		188	113769.81	36085	78	62,560.32	24,977	68	29898.82	7246	9	614.67	316	27	3,195.00	1,100	6	17,501.00	2,446

KPS Definitif

Mengetahui,

KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

MUHAMMAD NENG, ST.,MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19691125 200112 1002



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KEHUTANAN

Jalan S. Parman Nomor 9 Telepon 421260 Fax. 426860 Palu

Email : dtshut@sulteng.go.id Website : www.dishut.sultengprov.go.id

Permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang Belum di Verifikasi Teknis sd 31 Desember 2023

No.	Desa	Skem a PS	Luas Usulan (Ha)	Fungsi Kawasan	KTH/LPHD	Nomor Proposal	Tanggal Proposal	Nama Ketua	Jumlah KK	Wilayah Kerja	Ket
1	Desa Uwemanje Kec. Kinovaro Kab. Sigi	HD	203.51	HPT	LPHD Uwemanje	01/LD-UMJ/XI/2022	November 2022	Yunus	36	KPH Kulawi	
2	Desa Tolokibit Kec. Banggai Selatan Kab. Banggai	HD	214	HL	LD Asameo	140/102/VII/Ds.T I/Bgi-sel/2023	6 Juli 2023	Dimanto Ibrahim	46	KPH Pulau Peling	
	Jumlah		417.51								

Mengetahui,

**KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



MUHAMMAD NENG, ST.,MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691125 200112 1002



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS KEHUTANAN

Jalan S. Parman Nomor 9 Telepon 421260 Fax. 426860 Palu

Email : dishut@sulteng.go.id Website : www.dishut.sultengprov.go.id

Permohonan Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa (HD) yang Sudah Diverifikasi Teknis namun Belum Terbit SK s.d 31 Desember 2023

No	KPH	Lokasi / Desa & Kecamatan	No. BA Verifikasi Teknis	Tanggal	Luas Usulan	Fungsi Kawasan	Skema PS	Luas Setelah Vertek	Rekomendasi		Pendamping KPH / Nama LSM	Keterangan Hasil Vertek	SK Persetujuan Pengelolaan	Lang Perlu Dilengkapi sesuai Permenlhk No. 9 Tahu
									Diterima	Ditolak				
1	KPH Dolago Tanggunung	Desa Sipeso Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala	BA. 90/PKPS/PHD/PSKL.0/11/2016	24-Nov-16	1138	HPT	HD	1138	*		KPH	Luasan seluruhnya 1.138 Ha dapat direkomendasikan untuk areal HPHD dan masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas	BELUM ADA SK	
2	KPH Balantak	Desa Simpangan Kec. Masama Kab. Banggai	BA.02/x-4/BPSKL.2/PSL.0/02/2019	14-Feb-19	150	HPT & HP	HD	137	*		KPH	Usulan awal 150 Ha. Dapat diproses lebih lanjut seluas 137 Ha. Berkurang 13 Ha karena masuk ke dalam moratorium primer pada Peta Indikatif Penundaan pemberian Izin Baru revisi XIV dengan HPT seluas 12 Ha dan HP seluas 1 Ha	BELUM ADA SK	Daftar pengurus dan penerima manfaat langsung. Fotocopy KTP dan KK pengurus dan penerima manfaat langsung. Pakta Integritas. Revisi Kepdes karena masa berlaku kepdes pada saat permohonan sudah berakhir tanggal 1 April 2022. Surat rekomendasi KPH terkait Blok HHK-HA menjadi Blok Pemanfaatan untuk Perhutanan Sosial.
3	KPH Dampelas Tinombo	Desa Bambasiang Kec. Palasa Kab. Parigi Moutoung	BA.8/X-4/BPSKL.2/PSL.0/02/2019	15-Feb-19	4782.65	HPT	HD	3029.37	*		KPH	terdapat pengurangan seluas 1753,28 Ha karena berada di wilayah administrasi desa Ulatan dan Palasa Labori serta terdapat indikator TORA berupa fasum dan Fasos serta pemukiman seluas 2,2 Ha	BELUM ADA SK	Surat pernyataan LPHD terkait tidak akan menambah pemukiman di areal kerja HPHD (berdasarkan hasil pembahasan BA Boror: BA.12/PKPS/PHD/5/2019 tanggal 28 Mei 2019). Daftar pengurus dan penerima manfaat langsung. Fotocopy KTP dan KK pengurus dan penerima manfaat langsung. Pakta Integritas. Revisi Kepdes karena masa berlaku kepdes pada saat permohonan sudah berakhir tanggal 28 September 2021
4	KPH Toili Baturube	Desa Uempanapa Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Utara	BA. /PKPS/PHD/PSL.0/12/2019	9 Des 2019	530.12	HP	HD	530.12	*		KPH	permohonan HPHD dapat diterima seluruhnya	BELUM ADA SK	Daftar pengurus dan penerima manfaat langsung. Fotocopy KTP dan KK pengurus dan penerima manfaat langsung. Pakta Integritas. Revisi Kepdes karena masa berlaku kepdes pada saat permohonan akan berakhir tanggal 19 November 2022. Surat rekomendasi KPH terkait Blok HHK-HA menjadi Blok Pemanfaatan untuk Perhutanan Sosial

5	KPH Kulawi	Desa Kalora Kec. Kinovaro Kab. Sigi	BA.3/x-4/BPSKL.2/PSL.0/02/2021	18-Feb-21	354	HL	HD	319	*		KPH	berkurang seluas 35 Ha karena penyesuaian batas lahan garapan dengan batas kawasan dan wilayah administrasi Desa kalora yang telah disepakati bersama di Kabupaten Sigi	BELUM ADA SK	Daftar pengurus dan penerima manfaat langsung. Copy KTP dan KK pengurus dan penerima manfaat langsung. Pakta Integritas,
6	KPH Sintuvu Maroso	Desa Malei Kec. Lage Kab. Poso	BA.85/X-4/BPSKL.1/PSL.0/10/2021	10/10/2021	1104	HP	HD	600	*		KPH	berkurang seluas 503 Ha berdasarkan batas areal ppermohonan di lapangan dan kondisi tutupan lahan berupa hutan primer	BELUM ADA SK	
7	KPH Sivia Patuju	Desa Matako Kec. Tojo Barat Kab. Tojo Unauna	BA.86/X-4/BPSKL.1/PSL.0/10/2021	10/10/2021	315	HPT	HD	232	*		KPH	berkurang 131 Ha berdasakan penyesuaian kondisi tutupan lahan berupa hutan primer serta masuk dalam arahan PIPPIB moratorium Primer; (KK penerima manfaat langsung dan tidak langsung belum lengkap)	BELUM ADA SK	
8	KPH Balantak	Desa Doda Bunta Kec. Simpang Raya Kab. Banggai	BA.187/X-4/BPSKL.2/PSL.0/10/2022	07 Oktober 2022	98	HPT	HD	98	*		KPH	dapat diterima seluruhnya	BELUM ADA SK	
9	KPH Balantak	Desa Sumber Agung Kec. Nuhon Kab. Banggai	BA.189/X-4/BPSKL.2/PSL.0/10/2022	09 Oktober 2022	121	HPT	HD	46	*		KPH	areal yang dimohon seluas 121 Ha (luas setelah hasil perhitungan 120 Ha) dapat diterima seluas 46 Ha, berkurang 59 Ha karena menjadi APL dan seluas 15 ha karena berada di wilayah administrasi desa damai makmur	BELUM ADA SK	
10	KPH Dampelas Tinombo	Desa Dongkas, Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong	BA.25/X-3/BPSK	19-May-23	3000.7	HPT,HL	HD	1820	*		KPH	berkurang 1238 Ha karena merupakan areal LPHD silansa seluas 141 Ha, blok inti KPH seluas 899 Ha, berada di areal kelola desa bainaa 109 ha, dan tidak ada kases ke lokasi tersebut seluas 89 Ha. Bertambah 57 Ha karena penyesuaian batas kawasan hutan.	BELUM ADA SK	

11	KPH Dampelas Tinombo	Desa Ogoalas Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong	BA.26/X-3/BPSK	19-May-23	1836	HPT,HL	HD	1836	*		KPH	dapat diterima seluruhnya karena sebagian sudah ada pemanfaatan masyarakat menjadi lahan kebun (cokelat, cengkeh, jagung, bawang, durian dan lokasi penanaman RHL 2021 serta pemanfaatan HHBK	BELUM ADA SK	
12	KPH Pogogul	Desa Bodi Kec Paleleh Barat Kab. Buol	BA.140/X-3/BPS	30-Aug-23	610.64	HP,HPk	HD	541,15	*		KPH	areal yg dimohon semula berjumlah 610,64 Ha diterima seluas 541,15 Ha berkurang 69,49 Ha.	BELUM ADA SK	
13	KPH Pogogul	Desa Bonubogu Selatan Kec. Bunobogu Kab. Buol	BA.137/X-3/BPS	30-Aug-23	747.64	HP	HD	890.46	*		KPH	areal yg dimohon seluas 747,64 Ha terdapat penyesuaian dgn batas areal desa yg disepakati masyarakat menjadi 890,86 Ha bertambah 143,10	BELUM ADA SK	
14	KPH Pogogul	Desa Inalatan Kec. Bunobogu Kab. Buol	BA.138/X-3/BPS	30-Aug-23	747.64	HP	HD	747.64	*		KPH	dapat diterima seluruhnya karena tdk terdapat tumpang tindih	BELUM ADA SK	
15	KPH Pogogul	Desa Domag Mekar Kec. Bunobogu Kab. Buol	BA. 139/X-3/BP	30-Aug-23	402.82	HP	HD	775.27	*		KPH	areal yg dimohon semula 402,82 Ha (hasil perhitungan ulang) terdapat pengurangan sejumlah 143,10 Ha, karena masuk wilayah desa bunobogu selatan, berdasarkan surat revisi permohonan HD domag mekar No. 23/08-LPHD.DM/2023 menjadi seluas 775,27 HA, bertambah seluas 515,55 Ha	BELUM ADA SK	
16	KPH Banawa Lalundu	Desa Tinauka Kec. Rio Pakava Kab. Donggala	BA.143/X-3/BPSKL-II/PSL.O/9/2023	8-Sep-23	2942	HP, HPK	HD	2733	*		KPH Banawa Lalundu	areal yg dimohon semula 2942 Ha (luas sebenarnya hasil perhitungan ulang) dapat diterima seluas 2773 Ha, berkurang 209 Ha karena terdapat pemanfaatan kawasan dgn tanaman kelapa sawit seluas 204 Ha dan seluas 5 Ha merupakan areal kerja RPHJP Unit II KPH Lariang, Prov. Sulawesi Barat	BELUM ADA SK	
Jumlah					18,880.21			14931.86						

Mengetahui,



MUHAMMAD NENG, ST.,MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19691125 200112 1002



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KEHUTANAN

Jalan S. Parman Nomor 9 Telepon 421260 Fax. 426860 Palu

Email : dishut@sulteng.go.id Website : www.dishut.sultengprov.go.id

- Penjelasan IKK Outcome

Peningkatan Akses Legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial

Jumlah Kelompok Tani Hutan memperoleh akses legal

Perhutanan Sosial sd 2023

x 100%

Jumlah total KTH pengusul Akses Legal Perhutanan Sosial

188
218

x 100% **0.86**

Keterangan :

188 = jumlah kelompok yang telah mendapat akses legal perhutanan sosial (definitif)

218 = definitif akses legal + usulan belum vertek + HD sudah vertek belum SK + HKm sudah vertek belum SK

218 = 188 + 2 + 16 + 12



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KEHUTANAN

Jalan S. Parman Nomor 9 Telepon 421260 Fax. 426860 Palu
Email : dishut@sulteng.go.id Website : www.dishut.sultengprov.go.id

**REKAPITULASI PROGRES PELAKSANAAN RHL
DI UPT KPH LINGKUP DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

NO	KPH	NAMA KEGIATAN	REHABILITASI VEGETATIF						REHABILITASI SIPIL TEKNIS					PEMELIHARAAN							
			LOKASI	LUAS (Ha)	KOORDINAT	JENIS TANAMAN	JUMLAH TANAMAN (Batang)	FUNGSI KAWASAN	SUMBER DANA	LOKASI	JUMLAH (Unit)	KOORDI NAT	FUNGSI KAWASAN	SUMBER DANA	LOKASI	LUAS (Ha)	KOORDINA T	JENIS TANAMAN	JUMLAH TANAMAN	FUNGSI KAWASAN	SUMBER DANA
13	UPT KPH SINTUWU MAROSO	Penghijauan Lingkungan	Desa Sintuwu Lemba Kec. Lage	1		Palapi Mangga	550	APL APL	APBD APBD												
		Pengembangan PS	Desa Sintuwu Lemba Kec. Lage	8		Nantu Durian Musang King	4,162	APL APL	APBD APBD												
14	UPT KPH KULAWI	Penghijauan Lingkungan (Swakelola)	Desa Maku, Kec. Dolo	43		Ketapang Kencana Manohara Mahoni Jati Putih Benih Alpukat	1,000 1,000 1,815 2,000 15,500	APL APL APL APL APL	DBH-DR DBH-DR DBH-DR DBH-DR DBH-DR												
		Penghijauan Lingkungan (Pengadaan)		2		Durian Okulasi Mangga Okulasi	400 500	APL APL	DBH-DR DBH-DR												
		RHL BPDAS	Desa Kayumpia, Kec. Marawola Barat	75				HL	APBN												
		HHBK	Desa Padende, Kec. Marawola	0.06		Alpukat Okulasi Miki Mangga Okulasi	100 309	APL APL	DBH-DR DBH-DR												
Jumlah				3,862.06			371,497														

Mengetahui,

KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

MUHAMMAD NENG, ST.,MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691125 200112 1002





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KEHUTANAN

Jalan S. Parman Nomor 9 Telepon 421260 Fax. 426860 Palu

Email : dishut@sulteng.go.id Website : www.dishut.sultengprov.go.id

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebijakan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjauan Rekomendasi DPRD
1	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Kehutanan	DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan	57,726,725,554	51,548,269,468	-	-	-
			I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Program penataan ruang terintegrasi, penataan permukiman dan penyediaan ruang terbuka hijau, mitigasi perubahan iklim dan penegakan hukum dan rehabilitasi lingkungan hidup, serta memastikan agar seluruh aktivitas kegiatan masyarakat ramah lingkungan, guna mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan	54,800,565,300	48,631,648,390	-	-	-
			A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja.						
			A. Perangkat Daerah						
			1.1.01.01 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		7,200,000	7,200,000			
			b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat		5,150,000	5,150,000			
			c. Belanja Jasa Tenaga Ahli		3,400,000	3,400,000			
			d. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		42,679,096	42,679,094			
			1.1.01.02 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		9,134,500	9,134,500			
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		5,634,500	5,634,500			
			b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3,500,000	3,500,000			
			1.1.01.03 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		3,150,000	3,150,000			
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		2,600,000	2,600,000			
			b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat		550,000	550,000			
			1.1.01.04 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		11,650,000	11,650,000			
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		11,100,000	11,100,000			
			b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat		550,000	550,000			
			1.1.01.05 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		11,650,000	11,650,000			
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		11,100,000	11,100,000			
			b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat		550,000	550,000			
			1.1.01.06 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		137,444,650	137,414,650	Sisa belanja bahan Kantor dan Perjalanan Dinas	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		3,119,250	3,119,250			
			b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1,050,000	1,050,000			
			c. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		133,275,400	133,245,400			
			1.1.01.07 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		38,150,000	35,200,000	Sisa belanja makan minum	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		1,750,000	1,750,000			
			b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat		36,400,000	33,450,000			
			B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		48,013,379,526	41,863,283,221			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebijakan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjauan Rekomendasi DPRD
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		47.891.909.526	41.742.893.121	Sisa Gaji Pengawai dan Tunjangan	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Gaji Pokok PNS		23.737.196.318	20.362.914.036			
			b. Belanja Tunjangan Keluarga PNS		2.434.196.899	2.071.026.716			
			c. Belanja Tunjangan Jabatan PNS		825.851.936	665.099.700			
			d. Belanja Tunjangan Fungsional PNS		2.164.485.232	1.701.783.000			
			e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		535.777.424	437.045.000			
			f. Belanja Tunjangan Beras PNS		1.485.425.043	1.212.310.702			
			g. Belanja Tunjangan PPn/Tunjangan Khusus PNS		20.023.429	13.885.524			
			h. Belanja Pembulatan Gaji PNS		380.218	276.388			
			i. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		16.686.593.027	15.278.552.055			
			j. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengantian Biaya Cetak Peta		1.380.000	-			
			k. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penakalan Kekayaan Daerah		600.000	-			
			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		121.470.000	120.390.100	Sisa belanja bahan Kantor dan Perjalanan Dinas	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola		87.600.000	87.200.000			
			b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		630.000	630.000			
			c. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		33.240.000	32.560.100			
			C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		311.507.600	309.574.472			
			1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		311.507.600	309.574.472	Sisa belanja bahan Kantor dan Perjalanan Dinas	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak		34.800.000	34.800.000			
			b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		2.949.800	2.949.800			
			c. Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.375.000	1.375.000			
			d. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat		15.850.000	15.850.000			
			e. Belanja Jasa Tenaga Ahli		57.800.000	57.800.000			
			f. Belanja Jasa Pengukuran Tanah		6.000.000	5.146.000			
			g. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		192.732.800	191.653.672			
			D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		274.587.510	273.470.440			
			I Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		176.466.160	175.347.090	Sisa belanja Honorarium	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		10.570.000	10.569.250			
			b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat		9.300.000	9.300.000			
			c. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,		14.500.000	13.400.000			
			d. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan		19.650.000	19.650.000			
			e. Belanja Jasa Tenaga Ahli		18.000.000	18.000.000			
			f. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		104.444.160	104.227.840			
			2 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		98.123.350	98.123.350			
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		1.613.150	1.613.150			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebijakan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjauan Rekomendasi DPRD
			b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3,750,000	3,750,000			
			c. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		6,270,000	6,270,000			
			d. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		86,490,200	86,490,200			
					802,277,838	802,277,664			
			E. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor		216,312,915	216,312,905	Sisa belanja bahan Kantor	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis		75,280,300	75,280,300			
			b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan		42,249,750	42,249,750			
			c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		2,028,250	2,028,250			
			d. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		2,000,000	2,000,000			
			e. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan		71,950,000	71,950,000			
			f. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan		22,804,615	22,804,605			
			2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		54,974,780	54,974,596	Sisa belanja bahan Kantor	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		54,974,780	54,974,596			
			3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		530,990,143	530,990,143			
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		1,168,300	1,168,300			
			b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1,650,000	1,650,000			
			c. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		528,771,843	528,771,843			
					2,652,230,051	2,650,006,829			
			E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
			1. Pengadaan Mebel		113,448,322	113,401,000	Sisa Penawaran	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor		2,127,500	2,127,000			
			b. Belanja Modal Mebel		97,125,705	97,081,000			
			c. Belanja Modal Meja Kerja Pejabat		2,702,117	2,700,000			
			d. Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat		11,493,000	11,493,000			
			2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		2,076,193,129	2,074,449,045	Sisa Penawaran	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		1,030,471,667	1,030,471,667			
			b. Belanja Modal Alat Pembersih		5,500,000	5,450,000			
			c. Belanja Modal Alat Pendingin		84,176,322	84,109,000			
			d. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		71,633,480	71,406,830			
			e. Belanja Modal Peralatan Studio Audio		3,110,000	3,100,000			
			f. Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film		53,515,000	53,400,000			
			g. Belanja Modal Personal Computer		358,789,100	358,700,000			
			Belanja Modal Personal Computer(DBH-DR)		109,500,000	107,500,000			
			h. Belanja Modal Komputer Unit Lainnya		13,750,000	13,700,000			
			i. Belanja Modal Peralatan Personal Computer		47,433,560	47,433,170			
			j. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya		22,750,000	22,720,000			
			k. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		275,564,000	274,458,378			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebijakan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatas Permasalahan	Tinjauan Rekomendasi DPRD
			3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		462.588.600	462.156.784	Sisa Penawaran	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		3,393,600	3,393,600			
			b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-		47.750.000	47.533.778			
			c. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur		27.600.000	27.522.450			
			d. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		9.945.000	9.855.000			
			e. Belanja Modal Bangunan Parkir		180.400.000	180.359.882			
			f. Belanja Modal Pagar		193.500.000	193.492.074			
					1.289.503.669	1.288.020.444			
			G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			I. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		329.792.169	328.362.244	Sisa Penawaran	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Tagihan Telepon		1.800.000	1.507.120			
			b. Belanja Tagihan Listrik		268.379.169	268.364.789			
			c. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		12.600.000	11.575.000			
			d. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Bertanggungan		43.600.000	43.599.535			
			e. Belanja Paket/Pengiriman		3.420.000	3.316.500			
			2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		959.704.500	959.657.500	Sisa Jasa pelayanan umum	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola		155.070.000	155.070.000			
			c. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		24.480.000	24.480.000			
			d. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		8.704.500	8.704.500			
			f. Honorarium Rohaniwan		42.000.000	42.000.000			
			g. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		605.700.000	605.700.000			
			h. Belanja Jasa Tenaga Keamanan		120.000.000	120.000.000			
			i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		3.750.000	3.703.000			
					1.187.470.860	1.178.387.096			
			H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			I. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan		247.027.700	238.516.750	Sisa Jasa penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		2.949.800	2.949.800			
			b. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		118.079.700	109.568.950			
			c. Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat		126.000.000	126.000.000			
			2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		247.235.000	246.638.500	Sisa Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		128.200.000	128.200.000			
			b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		875.000	557.000			
			c. Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat		30.000.000	30.000.000			
			d. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-		25.010.000	25.000.000			
			e. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-		4.800.000	4.800.000			
			f. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-		29.200.000	29.181.500			
			g. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-		24.150.000	24.100.000			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebijakan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjauan Rekomendasi DPRD
			b. Belanja Bahan-Bahan Lainnya		14,600,000	14,600,000			
			c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		5,667,000	5,666,850			
			d. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DBH-DR)		2,130,000	2,130,000			
			e. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan		130,220,000	130,220,000			
			f. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		61,610,000	61,610,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa (DBH-DR)		96,030,000	92,290,524			
			3. Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan		102,600,450	102,038,150	Sisa Belanja Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		4,280,450	4,280,150			
			b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DBH-DR)		2,240,000	2,240,000			
			c. Belanja Perjalanan Dinas Biasa (DBH-DR)		103,080,000	102,518,000			
					507,209,948	505,722,448			
			C. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		319,210,000	317,722,500	sisa belanja perjalanan dinas	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
	3.105.01	I	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan						
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis		1,526,500	1,526,000			
			b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		625,000	625,000			
			c. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DBH-DR)		10,200,000	9,900,000			
			d. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		600,000	600,000			
			e. Belanja Jasa Tenaga Ahli		1,350,000	1,350,000			
			f. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		2,000,000	2,000,000			
			g. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		189,138,500	189,138,500			
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa (DBH-DR)		113,770,000	112,583,000			
			2. Koordinasi, Sintronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		187,999,248	187,999,248			
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis		312,000	312,000			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis		2,110,000	2,110,000			
			b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		3,837,948	3,837,948			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		2,150,000	2,150,000			
			c. Belanja Makanan dan Minuman Rapat		6,600,000	6,600,000			
			d. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,		900,000	900,000			
			e. Belanja Jasa Tenaga Ahli		2,250,000	2,250,000			
			f. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		15,000,000	15,000,000			
			g. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		97,700,000	97,700,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa (DBH-DR)		45,740,000	45,740,000			
			h. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		11,400,000	11,400,000			
			D. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		30,000,000	30,000,000			
	3.106.02	I	Fasilitasi Penuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Ber		30,000,000	30,000,000			
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		520,000	520,000			
			b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1,190,000	1,190,000			
			c. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		28,290,000	28,290,000			
			E. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan		130,000,000	129,680,000			

NO	Urusan Pemerintahan n	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebijakan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjauan Rekomendasi DPRD
			3.107.02 1. Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahua		130,000,000	129,600,000	sisa kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		1,440,000	1,440,000			
			b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1,400,000	1,400,000			
			c. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		120,710,000	120,390,000			
			d. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		6,450,000	6,450,000			
					245,420,950	245,306,800			
			E. Perbenihan Tanaman Hutan						
			1. Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar		44,999,800	44,999,550	Sisa kegiatan Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		1,369,800	1,369,550			
			c. Belanja Perjalanan Dinas Biasa (DBH-DR)		43,630,000	43,630,000			
			2. Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit		200,421,150	200,307,250	sisa belanja jasa Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman (DBH-DR)		155,400,000	155,307,500			
			b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		1,521,150	1,499,750			
			c. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DBH-DR)		2,240,000	2,240,000			
			d. Belanja Perjalanan Dinas Biasa (DBH-DR)		41,260,000	41,260,000			
					140,479,900	140,389,200			
			III. PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		140,479,900	140,349,900			
			A. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam						
			1. Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi		83,998,750	83,898,750	sisa belanja jasa Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis		990,000	990,000			
			b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		3,943,750	3,943,750			
			c. Belanja Makanan dan Minuman Rapat		13,475,000	13,475,000			
			d. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,		3,600,000	3,600,000			
			e. Belanja Jasa Tenaga Ahli		9,000,000	9,000,000			
			f. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		7,500,000	7,500,000			
			g. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		41,690,000	41,590,000			
			h. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		3,800,000	3,800,000			
			2. Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi		56,481,150	56,471,150	sisa belanja jasa Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis		1,237,500	1,237,500			
			b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		2,523,650	2,523,650			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebijakan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjauan Rekomendasi DPRD
			c. Belanja Makanan dan Minuman Rapat		9,250,000	9,240,000			
			d. Belanja Jasa Tenaga Ahli		9,000,000	9,000,000			
			e. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		5,000,000	5,000,000			
			f. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		24,720,000	24,720,000			
			g. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		4,750,000	4,750,000			
			IV. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		750,046,006	749,665,706			
			A. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		750,046,006	749,665,706			
			SL0101 1 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluhan Kehutanan dan SUM Bidang Kehutanan		80,046,000	80,046,000			
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis		297,000	297,000			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis		429,000	429,000			
			b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat		5,115,000	5,115,000			
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DBH-DR)		1,045,000	1,045,000			
			c. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,		3,600,000	3,600,000			
			d. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		40,970,000	40,970,000			
			e. Belanja Perjalanan Dinas Biasa (DBH-DR)		28,590,000	28,590,000			
			SL0102 2 Pengawalan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		538,780,606	538,400,606	sisa belanja jasa pengawalan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		294,000	294,000			
			b. Belanja Bahan-Bahan Baku		14,950,000	14,950,000			
			c. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman		99,850,000	99,850,000			
			d. Belanja Bahan-Bahan Lainnya		15,550,000	15,550,000			
			e. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis		4,996,386	4,996,386			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis		960,600	960,600			
			f. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan		96,000	96,000			
			g. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		800,000	800,000			
			h. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-		2,500,000	2,500,000			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan		16,337,660	16,337,660			
			untuk Kegiatan Kantor Lainnya		2,730,000	2,730,000			
			j. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada		27,800,000	27,800,000			
			k. Belanja Makanan dan Minuman Rapat		40,690,000	40,680,000			
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DBH-DR)		34,075,000	34,075,000			
			l. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)						
			m. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		1,200,000	1,200,000			
			n. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		800,000	800,000			
			o. Belanja Jasa Tenaga Ahli		14,400,000	14,400,000			
			p. Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan		2,225,000	2,225,000			
			q. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		3,900,000	3,900,000			
			Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		4,000,000	4,000,000			
			r. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang (DBH-		3,200,000	3,200,000			
			s. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		4,500,000	4,500,000			
			t. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		16,125,960	16,088,960			
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa (DBH-DR)		35,370,000	35,370,000			
			u. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		29,325,000	29,325,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (DBH-DR)		6,975,000	6,975,000			

NC	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebijakan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjauan Rekomendasi DPRD
			v. Belanja Hadiah yang Bersifat Persembahan		10,000,000	10,000,000			
			5.10.03 3. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial		131,279,400	131,279,100	Sisa belanja Jasa Tenaga Ahli	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis		2,620,000	2,620,000			
			b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DBH-DR)		4,950,000	4,950,000			
			c. Belanja Jasa Tenaga Ahli		5,400,000	5,400,000			
			d. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		5,500,000	5,500,000			
			e. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua (DBH-DR)		1,200,000	1,200,000			
			f. Belanja Perjalanan Dinas Biasa (DBH-DR)		106,149,400	106,149,100			
			g. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (DBH-DR)		5,400,000	5,400,000			
			V. PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		100,380,000	98,650,000			
			A. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		100,380,000	98,650,000			
			I. Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS		20,000,000	20,000,000			
			a. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman		18,900,000	18,900,000			
			b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		1,100,000	1,100,000			
			2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS		80,380,000	78,650,000	Sisa belanja Jasa Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		950,000	950,000			
			b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat		2,240,000	2,240,000			
			c. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		77,190,000	75,440,000			
	UPTD TAHURA		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		1,023,108,130	1,013,061,264			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		495,819,449	486,564,169			
			I. Penyediaan Borang Cetakan dan Penggandaan		78,375,250	72,525,021			
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		6,222,250	6,222,250			
			b. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		4,002,250	4,002,250			
			2. Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		72,153,000	66,302,771	Sisa Perjalanan Dinas	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		1,750,000	1,750,000			
			b. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		70,403,000	64,552,771			
			B. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		352,824,199	350,007,948			
			I. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		75,324,199	72,507,948	Sisa belanja Jasa Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebijakan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjauan Rekomendasi DPRD
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		2,741,175	2,686,775			
			b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		5,868,500	5,864,125			
			c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		1,380,000	1,380,000			
			d. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		3,376,333	3,371,600			
			e. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		6,386,343	6,383,955			
			f. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		5,917,410	5,916,870			
			g. Belanja Makanan dan Minuman Rapat		11,200,000	11,156,000			
			h. Belanja Tagihan Listrik		18,534,438	15,828,623			
			i. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		19,920,000	19,920,000			
					227,500,000	227,500,000			
			2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
			a. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		39,240,000	39,240,000			
			b. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan		6,000,000	6,000,000			
			c. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum		33,660,000	33,660,000			
			d. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		144,600,000	144,600,000			
			e. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		54,000,000	54,000,000			
					64,620,000	64,031,200			
			C. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			I. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		64,620,000	64,031,200	Sisa belanja Jasa Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		25,850,000	25,850,000			
			b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		280,000	201,200			
			c. Belanja Jasa Pengolahan Sampah		1,200,000	1,200,000			
			d. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor		8,000,000	8,000,000			
			e. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor		7,500,000	7,500,000			
			f. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		3,660,000	3,660,000			
			g. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		18,130,000	17,620,000			

NC	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebijakan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjauan Rekomendasi DPRD
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		527,288,681	526,497,095			
			A. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi		527,288,681	526,497,095			
			1 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi		51,300,000	50,870,000	Sisa Perjalanan Dinas	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		51,300,000	50,870,000			
			2 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi		216,748,681	216,748,680	Sisa Penawaran kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (DBH-DR) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor		4,000,000	4,000,000			
			b. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (DBH-DR)		10,948,681	10,948,681			
			c. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural (DBH-DR)		12,000,000	11,899,999			
			d. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur (DBH-DR)		8,000,000	8,000,000			
			e. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (DBH-DR)		180,000,000	179,900,000			
			3 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi		261,040,000	260,878,415	Sisa Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman		185,796,000	185,634,415			
			b. Belanja Bahan-Bahan Lainnya		5,304,000	5,304,000			
			c. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas		4,000,000	4,000,000			
			d. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum		4,590,000	4,590,000			
			e. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		19,800,000	19,800,000			
			f. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		41,550,000	41,550,000			
			UPT KPH DAMPELAS TINOMBLO		2,054,899,000	2,027,310,134			
			I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		593,426,330	592,844,253			
			A. Administrasi Umum Perangkat Daerah		77,955,250	77,954,801			
			1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor		70,510,300	70,510,016			
			a. Belanja Bahan-Bahan Lainnya		5,400,000	5,400,000			
			b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		3,035,400	3,035,400			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (DBH-DR)		6,589,036	6,588,750			
			c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		4,013,000	4,013,000			
			d. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		2,500,000	2,500,000			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebijakan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjauan Rekomendasi DPRD
			e. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		17,716,500	17,716,500			
			f. Belanja Makanan dan Minuman Rapat		16,500,000	16,500,000			
			g. Belanja Modal Mebel		14,756,364	14,756,364			
			2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		7,444,950	7,444,787			
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		7,444,950	7,444,787			
			B. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		402,311,080	401,739,452			
		I	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		31,342,287	30,791,002	Sisa Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		1,955,010	1,951,002			
			b. Belanja Tagihan Listrik		15,007,271	14,440,000			
			c. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		14,400,000	14,400,000			
		2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		370,948,799	370,948,450	Sisa Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		39,240,000	39,240,000			
			b. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan		6,000,000	6,000,000			
			c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		5,308,799	5,308,450			
			d. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		144,000,000	144,000,000			
			e. Jasa Tenaga Kebersihan kantor		36,000,000	36,000,000			
			f. Belanja Jasa Tenaga Keamanan		140,400,000	140,400,000			
		C.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		113,160,000	113,150,000			
		I	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		113,160,000	113,150,000	sisa Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		82,160,000	82,150,000			
			b. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang		8,000,000	8,000,000			
			c. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua		19,500,000	19,500,000			
			d. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		3,500,000	3,500,000			
		II.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		1,096,202,670	1,069,714,131			
		A.	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		874,222,670	856,271,100			
		I	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara		295,000,000	294,999,800	Sisa Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebijakan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjauan Rekomendasi DPRD
			IV. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		365,270,000	364,751,750			
			A. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		365,270,000	364,751,750			
			1. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		305,100,000	305,081,250	Sisa Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		600,000	600,000			
			b. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman		298,000,000	297,982,550			
			c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		3,170,000	3,169,400			
			d. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		3,330,000	3,330,000			
			2. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial		60,170,000	59,662,800	Sisa Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (DBH-DR)		2,400,000	2,400,000			
			b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (DBH-DR)		2,351,500	2,351,300			
			c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (DBH-DR)		4,146,750	4,146,750			
			d. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DBH-DR)		8,250,000	8,250,000			
			e. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) (DBH-DR)		12,136,000	12,136,000			
			f. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) (DBH-DR)		19,785,750	19,785,750			
			h. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		11,100,000	10,600,000			
			UPT KPH DOLAGO TANGGUNUNG		1,938,350,000	1,930,562,255			
			I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		456,847,500	456,820,155			
			A. Administrasi Umum Perangkat Daerah		70,717,400	70,690,085			
			1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor		7,335,650	7,335,650			
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		982,550	982,550			
			b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		4,565,600	4,565,600			
			c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1,787,500	1,787,500			
			2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		4,961,750	4,961,750			
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		4,961,750	4,961,750			
			3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50,420,000	50,392,685	Sisa perjalanan Dinas	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3,300,000	3,300,000			
			b. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		55,120,000	55,092,685			
			B. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		287,915,500	287,915,470			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebijakan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjauan Rekomendasi DPRD
			I. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		55.145.500	55.145.570	Sisa Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Tagihan Air		1,382,700	1,382,670			
			b. Belanja Tagihan Listrik		36.520,000	36.520,000			
			c. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		17.242,800	17.242,800			
			2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		232.770.000	232.770.000			
			a. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola		29.170,000	29.170,000			
			b. Belanja Jasa Pengelolaan BMG yang Tidak		6.000,000	6.000,000			
			c. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		165.200,000	165.200,000			
			d. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		32.400,000	32.400,000			
			C. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		98.214.600	98.214.600			
			I. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		78.050.000	78.050.000			
			a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		42.550,000	42.550,000			
			b. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang		28.000,000	28.000,000			
			c. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua		7.500,000	7.500,000			
			2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		20.164.600	20.164.600			
			a. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		5.314,600	5.314,600			
			b. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum		4.250,000	4.250,000			
			c. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		4.880,000	4.880,000			
			d. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		3.650,000	3.650,000			
			e. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer		2.070,000	2.070,000			
			II. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		896.502.500	889.542.500			
			A. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		863.870.000	857.410.000			
			I. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara		863.870.000	857.410.000	Sisa Kegiatan Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman		598.870,000	595.185,000			
			b. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		115.000,000	115.000,000			
			c. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (DBH-DR)		150.000,000	147.225,000			
			B. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan		13.152,500	13.052,500			
			I. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan		13.152,500	13.052,500	Sisa Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebijakan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjauan Rekomendasi DPRD
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		452,500	452,500			
			b. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		12,700,000	12,600,000			
			C. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		19,480,000	19,080,000			
		1	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya		19,480,000	19,080,000	Sisa Kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
		a.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		740,000	740,000			
		b.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		16,740,000	16,340,000			
	IV.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			585,000,000	584,199,600			
	A.	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			585,000,000	584,199,600			
	1	Pengawatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			585,000,000	584,199,600	Sisa Kegiatan Pengawatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
	a.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi			150,500,000	149,805,000			
		Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (DBH-DR)			185,000,000	184,944,600			
	b.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman			100,000,000	99,950,000			
		Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman (DBH-DR)			76,320,000	76,320,000			
	c.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			600,000	600,000			
	d.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (DBH-DR)			49,500,000	49,500,000			
	e.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DBH-DR)			6,600,000	6,600,000			
	f.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (DBH-DR)			880,000	880,000			
	g.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (DBH-DR)			15,600,000	15,600,000			
	UPT KPH TOILI BATURUBE				1,072,890,050	1,045,221,346			
	I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			418,239,196	395,340,996			
	A.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			66,149,196	51,391,196			
	1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			6,149,196	6,149,196			
	a.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya			3,629,196	3,629,196			
	b.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			2,520,000	2,520,000			
	2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			10,000,000	9,296,000	Sisa Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	

NC	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebijakan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjauan Rekomendasi DPRD
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		4,122,000	4,122,000			
			b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		3,304,000	3,300,000			
			c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		2,574,000	2,574,000			
		3	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>		50,000,000	35,246,000	Sisa perjalanan Dinas	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		50,000,000	35,246,000			
			B. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		267,930,000	259,829,800			
		1	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>		99,970,000	96,870,000	Sisa Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Makanan dan Minuman Rapat		7,950,000	7,920,000			
			b. Belanja Tagihan Listrik		22,300,000	22,300,000			
			c. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		11,700,000	11,700,000			
			d. Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal		30,000,000	30,000,000			
			e. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		22,920,000	22,550,000			
			f. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		5,100,000	2,400,000			
		2	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>		167,960,000	162,959,800	Sisa Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		39,240,000	39,240,000			
			b. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan		6,000,000	6,000,000			
			c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		5,120,000	5,119,800			
			d. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		117,600,000	112,600,000			
		C.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		84,160,000	84,120,000			
		1	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>		44,160,000	44,160,000			
			a. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang		36,660,000	36,660,000			
			b. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua		7,500,000	7,500,000			
		2	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>		40,000,000	39,960,000	Sisa Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	

NC	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebijakan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjauan Rekomendasi DPRD
			a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		10,440,000	10,400,000			
			b. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		6,100,000	6,100,000			
			c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		7,260,000	7,260,000			
			d. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		16,200,000	16,200,000			
					634,650,904	629,210,450			
					619,951,550	615,211,400			
			II. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						
			A. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara						
		1	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara					Sisa Belanja Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)
			a. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman (DBH-DR)		148,500,000	148,401,000			
			b. Belanja Bahan-Bahan Lainnya (DBH-DR)		9,510,000	9,510,000			
			c. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (DBH-DR)		41,990,000	41,990,000			
			d. Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1,600,000	1,600,000			
			e. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		2,900,000	2,900,000			
			f. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		5,500,000	5,500,000			
		2	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara					Sisa Belanja Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)
			a. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman		383,000,000	379,438,350			
			b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		1,951,550	1,951,550			
			c. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah		25,000,000	23,920,500			
		B.	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					9,969,950	9,969,950
		1	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan					9,969,950	9,969,950
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		649,950	649,950			
			b. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		6,020,000	6,020,000			
			c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		3,300,000	3,300,000			
		C.	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					4,729,404	4,729,100
		1	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya					4,729,404	4,729,100
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		359,404	359,100			
			b. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		770,000	770,000			
			c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		3,600,000	3,600,000			
		IV.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					19,999,950	19,969,900

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebijakan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjauan Rekomendasi DPRD
			A. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		19,999,950	19,969,900			
			1. Pengawas dan Pendampingan Kelembagaan Kelamatan Tanah Hutan		10,000,000	9,869,950			
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		680,000	649,950			
			b. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		7,520,000	7,520,000			
			c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1,800,000	1,800,000			
			2. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial		9,999,950	9,999,950			
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		649,950	649,950			
			b. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		7,850,000	7,850,000			
			c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1,500,000	1,500,000			
	UPT KPH BANAWA LALUNDU		I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		4,051,447,483	4,036,614,446			
			A. Administrasi Umum Perangkat Daerah		698,982,513	690,719,196			
			1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor		254,269,613	246,255,301			
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		141,148,416	140,748,099			
			b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		4,302,200	4,302,200			
			c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komuter		17,994,000	17,983,500			
			d. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas		12,374,000	12,374,000			
			e. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		18,938,216	18,936,500			
			f. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		15,296,610	15,079,399			
			g. Belanja Makanan dan Minuman Rapat		16,500,000	16,500,000			
			h. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)		6,826,500	6,822,000			
			i. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (POL)		21,700,500	21,700,500			
			j. Belanja Pakaian Olahraga		25,716,390	25,550,000			
			k. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya		1,500,000	1,500,000			
			2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		53,396,661	53,345,863			
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		53,396,661	53,345,863			
			3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		59,724,536	52,161,339			
			a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		24,693,000	17,129,803			
			b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		6,240,000	6,240,000			
			c. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		28,791,536	28,791,536			
			B. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		347,982,900	347,733,895			
			1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		26,352,900	26,352,900			
			a. Belanja Tagihan Listrik		11,008,500	11,008,500			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebijakan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjauan Rekomedasi DPRD
			f. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (DBH-DR)		1,125,000	1,125,000			
			g. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (DBH-DR)		900,000	900,000			
			h. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum		7,225,000	7,225,000			
			Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (DBH-DR)		46,750,000	46,750,000			
			i. Belanja Jasa Tenaga Ahli (DBH-DR)		450,000	450,000			
			j. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (DBH-DR)		9,834,600	9,834,600			
			k. Belanja Perjalanan Dinas Biasa (DBH-DR)		4,510,000	4,510,000			
			L. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1,040,000	1,040,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (DBH-DR)		4,590,000	4,590,000			
	2	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara			2,165,355,400	2,160,934,000	Sisa Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
		a. Belanja Bahan-Bahan Kimia			1,300,000	1,300,000			
		b. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman			1,328,965,000	1,328,965,000			
		Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman (DBH-DR)			66,300,400	66,082,400			
		c. Belanja Bahan-Bahan Lainnya (DBH-DR)			2,025,000	2,025,000			
		d. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			3,450,000	3,450,000			
		e. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat			684,875,000	680,672,400			
		f. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (DBH-DR)			52,700,000	52,700,000			
		g. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			25,740,000	25,740,000			
	C	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			98,900,000	98,900,000			
	1	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan			98,900,000	98,900,000			
		a. Belanja Makanan dan Minuman Rapat			2,750,000	2,750,000			
		b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DBH-DR)			2,750,000	2,750,000			
		c. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			1,800,000	1,800,000			
		d. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (DBH-DR)			1,800,000	1,800,000			
		e. Belanja Jasa Tenaga Ahli			900,000	900,000			
		Belanja Jasa Tenaga Ahli (DBH-DR)			900,000	900,000			
		f. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang (DBH-DR)			3,000,000	3,000,000			
		g. Belanja Perjalanan Dinas Biasa			23,540,000	23,540,000			
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa (DBH-DR)			15,620,000	15,620,000			
		h. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (DBH-DR)			14,400,000	14,400,000			
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			31,440,000	31,440,000			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebijakan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjauan Rekomendasi DPRD
			IV. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		528,922,170	526,991,350			
			A. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		528,922,170	526,991,350			
			1. Penguanan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		403,322,170	401,920,000	Sisa belanja Penguanan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		130,005,000	129,655,000			
			b. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman		125,190,000	125,190,000			
			c. Belanja Bahan-Bahan Lainnya		2,350,000	2,350,000			
			d. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya		9,745,000	9,745,000			
			e. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1,250,000	1,250,000			
			f. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		57,307,170	56,700,000			
			g. Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1,650,000	1,650,000			
			h. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		900,000	900,000			
			i. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum		54,570,000	54,570,000			
			j. Belanja Jasa Tenaga Ahli		1,350,000	900,000			
			k. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		3,410,000	3,410,000			
			l. Belanja Perjalanan Dinas Biasa (DBH-DR)		6,600,000	6,600,000			
			m. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (DBH-DR)		9,000,000	9,000,000			
			2. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial		125,595,000	125,071,350	Sisa belanja Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman		64,725,000	64,329,450			
			b. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		38,490,000	38,361,700			
			c. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DBH-DR)		9,900,000	9,900,000			
			d. Belanja Perjalanan Dinas Biasa (DBH-DR)		5,280,000	5,280,000			
			e. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (DBH-DR)		7,200,000	7,200,000			
	UPT KPH KULAWI				916,640,000	911,261,079			
	I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				459,136,000	458,560,006			
	A. Administrasi Umum Perangkat Daerah				75,505,000	75,040,017			
	1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor				66,586,880	66,121,942			
	a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis				4,527,165	4,507,165			
	b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan				7,714,900	6,915,320			
	c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan				7,343,488	7,258,130			
	d. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan				10,151,327	10,151,327			
	e. Belanja Makanan dan Minuman Rapat				37,290,000	37,290,000			
	2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8,918,120	8,918,075			
	a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan				8,918,120	8,918,075			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebijakan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjauan Rekomendasi DPRD
			B. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		245.761.000	245.649.989			
			1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan		18.618.000	18.618.000			
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		1.932.000	1.932.000			
			b. Belanja Tagihan Listrik		16.686.000	16.686.000			
			2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		227.143.000	227.031.989			
			a. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola		39.240.000	39.240.000			
			b. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak		6.000.000	6.000.000			
			c. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		2.400.000	2.400.000			
			d. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		159.000.000	159.000.000			
			e. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		10.845.000	10.845.000			
			f. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		1.608.000	1.496.989			
			g. Belanja Sewa Peralatan Jaringan		850.000	850.000			
			h. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		7.200.000	7.200.000			
			C. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		137.870.000	137.870.000			
			1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan		46.500.000	46.500.000			
			a. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan		24.000.000	24.000.000			
			b. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan		22.500.000	22.500.000			
			2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		91.370.000	91.370.000			
			a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		84.250.000	84.250.000			
			b. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-		5.660.000	5.660.000			
			c. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-		1.460.000	1.460.000			
			II. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		360.846.500	357.695.668			
			A. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		255.866.059	255.006.247			
			1. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar		255.866.059	255.006.247			
			a. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman		157.010.000	156.150.397			
			Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman (DBH-DR)		56.679.559	56.679.350			
			b. Belanja Bahan-Bahan Lainnya		3.900.000	3.900.000			
			Belanja Bahan-Bahan Lainnya (DBH-DR)		13.456.500	13.456.500			
			c. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan		24.820.000	24.820.000			
					51.025.750	48.734.730			
			B. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan				Sisa Belanja Pencegahan dan		
			1. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan		51.025.750	48.734.730	Pembatasan Kerusakan Hutan	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (DBH-DR)		10.350.000	10.350.000			
			b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis		541.050	541.050			
			c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan		210.700	210.700			
			d. Belanja Perjalanan Dinas Biasa (DBH-DR)		8.874.000	6.582.980			
			e. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (DBH-DR)		31.050.000	31.050.000			
			C. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		53.954.691	53.954.691			
			1. Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak		53.954.691	53.954.691			
			a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		2.400.000	2.400.000			
			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (DBH-DR)		5.500.000	5.500.000			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebijakan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjauan Rekomendasi DPRD
			b. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman (DBH-DR)		20,324,691	20,324,691			
			c. Belanja Bahan-Bahan Lainnya (DBH-DR)		500,000	500,000			
			d. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan		6,630,000	6,630,000			
			e. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		7,200,000	7,200,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (DBH-DR)		11,400,000	11,400,000			
			IV. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN		96,657,500	95,005,405			
			A. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan		96,657,500	95,005,405			
			I. Pengawatan dan Pendampingan Kelembagaan		50,405,000	50,405,000			
			a. Bahan Bakar dan Pelumas		5,250,000	5,250,000			
			Bahan Bakar dan Pelumas (DBH-DR)		12,000,000	12,000,000			
			b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		315,000	315,000			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		840,000	840,000			
			c. Belanja Makanan dan Minuman Rapat		8,250,000	8,250,000			
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DBH-DR)		19,250,000	19,250,000			
			d. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (DBH-DR)		4,500,000	4,500,000			
			2. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial		46,252,500	44,600,405	Sisa belanja Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Bahan Bakar dan Pelumas		2,400,000	2,400,000			
			Bahan Bakar dan Pelumas (DBH-DR)		4,500,000	4,500,000			
			b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis		545,000	545,000			
			c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		1,228,500	1,228,500			
			d. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DBH-DR)		3,300,000	3,300,000			
			e. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		13,579,000	11,926,905			
			f. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		7,200,000	7,200,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (DBH-DR)		13,500,000	13,500,000			
	UPT KPH SINTUWU MAROSO				1,097,257,300	1,095,861,547			
	I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				536,267,300	536,262,767			
	A. Administrasi Umum Perangkat Daerah				110,546,011	110,541,478			
	I. Penyediaan Bahan Logistik Kantor				52,645,213	52,640,680			
	a. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi				3,569,500	3,569,500			
	b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis				2,623,225	2,623,000			
	c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan				1,423,200	1,423,200			
	d. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan				2,750,000	2,750,000			
	e. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan				7,749,288	7,744,980			
	f. Belanja Makanan dan Minuman Rapat				19,200,000	19,200,000			
	g. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)				12,250,000	12,250,000			
	h. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum				3,080,000	3,080,000			
	2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggaardaan				2,900,000	2,900,000			
	a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan				2,900,000	2,900,000			
	3. Penyelegaraan Rapet Koordinasi dan Konsultasi				55,000,798	55,000,798			
	a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				30,000,000	30,000,000			
	b. Belanja Perjalanan Dinas Biasa				25,000,798	25,000,798			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebijakan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjauan Rekomendasi DPRD
					380,231,289	380,231,289			
	B.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			58,999,289	58,999,289			
	1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan			1,510,900	1,510,900			
		a. Belanja Tagihan Air			43,324,189	43,324,189			
		b. Belanja Tagihan Listrik			1,750,000	1,750,000			
		c. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah			11,614,200	11,614,200			
		d. Belanja Kawat/Faksimil/Internet/TV Berlangganan							
	2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			322,032,000	322,032,000			
		a. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola			34,320,000	34,320,000			
		b. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak			6,000,000	6,000,000			
		c. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan			14,280,000	14,280,000			
		d. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum			267,000,000	267,000,000			
		e. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			432,000	432,000			
	C.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			45,490,000	45,490,000			
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan			45,490,000	45,490,000			
		a. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan			40,000,000	40,000,000			
		b. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-			5,490,000	5,490,000			
	II.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			339,065,000	337,675,000			
	A.	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			159,010,000	157,620,000			
	1.	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara			159,010,000	157,620,000	Sisa penawaran bibit		
		a. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman							
	B.	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan			180,055,000	180,055,000			
	1.	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan			180,055,000	180,055,000			
		a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis			1,045,000	1,045,000			
		b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan			1,250,000	1,250,000			
		c. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			780,000	780,000			
		d. Belanja Pakaiian Dinas Lapangan (PDL) (DBH-DR)			2,000,000	2,000,000			
		e. Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (DBH-OR)			1,800,000	1,800,000			
		f. Belanja Perjalanan Dinas Biasa (DBH-OR)			52,430,000	52,430,000			
		g. Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota (DBH-DR)			120,750,000	120,750,000			
	IV.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN			221,925,000	221,923,780			
	A.	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan			221,925,000	221,923,780			
	1.	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan			200,000,000	199,998,780			
		a. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman			197,917,000	197,917,000			
		b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis			734,948	734,700			
		c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan			1,348,052	1,347,080			
	2.	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial			21,925,000	21,925,000			
		a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan			325,000	325,000			
		b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (DBH-DR)			21,600,000	21,600,000			
	UPT KPH SIVIA PATUJU				2,187,925,000	2,185,250,535			
	I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			455,734,800	455,627,850			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebijakan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjauan Rekomendasi DPRD
			A. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			I. Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis		47,143,700	47,078,950			
			b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan		13,690,100	13,690,050			
			c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		934,500	934,500			
			d. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan		4,413,800	4,413,750			
			e. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan		1,000,000	1,000,000			
					5,445,000	5,445,000			
					1,896,800	1,896,800			
			2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi						
			a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		33,453,600	33,388,900			
			b. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		5,500,000	5,500,000			
			c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		25,703,600	25,638,900			
					2,250,000	2,250,000			
			B. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			I. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan						
			a. Belanja Tagihan Air		325,448,900	325,448,900			
			b. Belanja Tagihan Listrik		24,604,900	24,604,900			
			c. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		260,000	260,000			
					13,184,900	13,184,900			
					11,160,000	11,160,000			
			2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
			a. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola		301,044,000	301,044,000			
			b. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak		39,240,000	39,240,000			
			c. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		6,000,000	6,000,000			
			d. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		154,800,000	154,800,000			
			e. Belanja Jasa Tenaga Keamanan		54,000,000	54,000,000			
			f. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		19,200,000	19,200,000			
			g. Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung		1,584,000	1,584,000			
			h. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-		25,000,000	25,000,000			
					1,220,000	1,220,000			
			C. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan						
			I. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan						
			a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		82,942,200	82,900,000			
			b. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan		82,942,200	82,900,000			
			c. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan		13,242,200	13,200,000			
					61,450,000	61,450,000			
					8,250,000	8,250,000			
			II. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						
			A. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan						
			I. Penyusunan Rancangan Bangun Tata Hutan Wilayah						
			a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		983,305,600	981,354,590			
			b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		17,693,600	17,693,600			
					17,693,600	17,693,600			
					10,943,600	10,943,600			
					6,750,000	6,750,000			
			B. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali						
			I. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan						
			a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		10,943,600	10,943,600			
					10,943,600	10,943,600			
					10,943,600	10,943,600			
			C. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara						
			I. Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara						
					843,521,800	841,885,300			
					241,562,800	241,228,000	Sisa perjalanan Dinas	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebijakan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjauan Rekomendasi DPRD
			UPT KPH BALANTAK		1,797,935,000	1,796,702,327			
			I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		666,639,150	666,096,607			
			A. Administrasi Umum Perangkat Daerah		277,392,150	276,861,430			
			1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor		41,410,530	41,410,530			
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis		2,889,274	2,887,274			
			b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan		8,026,000	8,026,000			
			c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		12,054,000	12,054,000			
			d. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		940,000	940,000			
			e. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan		6,331,256	6,331,256			
			f. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan		1,160,000	1,160,000			
			g. Belanja Makanan dan Minuman Rapat		10,010,000	10,010,000			
			2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		2,485,300	2,485,300			
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		2,485,300	2,485,300			
			3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		233,496,320	232,965,600	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)		
			a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		233,496,320	232,965,600			
			B. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		213,457,000	213,445,177			
			1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan		26,367,000	26,367,000			
			a. Belanja Jasa Pengolahan Sampah		1,200,000	1,200,000			
			b. Belanja Tagihan Air		112,400	112,400			
			c. Belanja Tagihan Listrik		12,100,000	12,100,000			
			d. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		4,200,000	4,200,000			
			e. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		8,754,600	8,754,600			
			2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		187,090,000	187,078,177			
			a. Belanja Honorarium Penangungjawaban Pengelola		32,800,000	32,800,000			
			b. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak		6,000,000	6,000,000			
			c. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		147,000,000	147,000,000			
			d. Belanja Paket/Pengiriman		540,000	540,000			
			e. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		750,000	738,177			
			C. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		175,790,000	175,790,000			
			1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan		175,790,000	175,790,000			
			a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		63,500,000	63,500,000			
			b. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan		103,320,000	103,320,000			
			c. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga		1,830,000	1,830,000			
			d. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-		4,380,000	4,380,000			
			e. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-		2,760,000	2,760,000			
			II. PROGRAM PENGOLEOAN HUTAN		894,188,350	893,498,220			
			A. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		804,218,350	803,528,220			
			1. Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan		29,964,450	29,964,450			
			- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya		29,964,450	29,964,450			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebijakan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjauan Rekomendasi DPRD
			a. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman (DBH-DR)		175,050,000	175,000,000			
			b. Belanja Bahan-Bahan Lainnya (DBH-DR)		10,557,400	10,500,000			
			c. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan		14,450,000	14,450,000			
			d. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan		10,000,000	9,934,000			
			e. Belanja Perjalanan Dinas Biasa (DBH-DR)		22,055,400	21,894,800			
			f. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (DBH-DR)		9,450,000	9,450,000			
			2. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar.		601,959,000	600,656,500			
			a. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman		479,609,000	478,356,500			
			b. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman (DBH-DR)		101,950,000	101,900,000			
			c. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan		20,400,000	20,400,000			
			C. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan.		33,983,600	33,833,600			
			I. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan		33,983,600	33,833,600	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)		
			a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		4,400,000	4,400,000			
			b. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		12,483,600	12,483,600			
			c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (DBH-DR)		17,100,000	16,950,000			
			D. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		77,163,000	76,998,490			
			I. Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak.		77,163,000	76,998,490			
			a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		5,000,000	5,000,000			
			b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		200,000	200,000			
			c. Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4,125,000	4,125,000			
			d. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		1,500,000	1,500,000			
			e. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		45,188,000	45,023,490			
			f. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		21,150,000	21,150,000			
			IV. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN.		748,884,600	748,268,095			
			A. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan.		748,884,600	748,268,095			
			I. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan.		519,352,000	518,800,540	Sisa Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		85,867,331	85,720,040			
			b. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman		393,352,000	393,014,300			
			c. Belanja Bahan-Bahan Lainnya		500,000	500,000			
			d. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan		4,132,669	4,132,000			
			e. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan		25,500,000	25,500,000			
			f. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan		10,000,000	9,934,000			
			2. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial		229,532,600	229,467,555	Sisa belanja Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman		199,050,000	199,032,750			
			b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (DBH-DR)		1,800,000	1,800,000			
			c. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		13,979,000	13,931,205			
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa (DBH-DR)		14,703,600	14,703,400			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebijakan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjauan Rekomendasi DPRD
			2. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara		774,253,900	773,563,770	Sisa Belanja Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman		744,253,900	743,608,200			
			b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan		30,000,000	29,955,570			
			B. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan		63,970,000	63,970,000			
			1. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan		63,970,000	63,970,000			
			a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		8,000,000	8,000,000			
			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (DBH-DR)		10,000,000	10,000,000			
			b. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		19,500,000	19,500,000			
			c. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		23,790,000	23,790,000			
			d. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (DBH-DR)		680,000	680,000			
			e. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		2,000,000	2,000,000			
			C. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan		26,000,000	26,000,000			
			1. Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan		26,000,000	26,000,000			
			a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		8,000,000	8,000,000			
			b. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		18,000,000	18,000,000			
			IV. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN		237,107,500	237,107,500			
			A. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan		237,107,500	237,107,500			
			1. Pengawalan dan Pendampingan Kelembagaan		217,670,000	217,670,000			
			a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (DBH-DR)		6,400,000	6,400,000			
			b. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		11,520,000	11,520,000			
			c. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman		199,750,000	199,750,000			
			2. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial		19,437,500	19,437,500			
			a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (DBH-DR)		4,800,000	4,800,000			
			b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis		693,000	693,000			
			c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan		795,750	795,750			
			d. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		898,750	898,750			
			e. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		550,000	550,000			
			f. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		11,700,000	11,700,000			
	UPT KPH PULAU PELING				665,917,358	665,351,603			
	I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				478,783,058	478,227,983			
	A. Administrasi Umum Perangkat Daerah				98,163,778	97,608,699			
			1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor		17,064,210	17,064,210			
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis		1,589,250	1,589,250			
			b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan		2,283,750	2,283,750			
			c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan		3,000,000	3,000,000			
			d. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		431,250	431,250			
			e. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan		3,379,960	3,379,960			
			f. Belanja Makanan dan Minuman Rapat		6,380,000	6,380,000			
			2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggaardaan		4,137,464	4,137,464			
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		4,137,464	4,137,464			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebijakan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjauan Rekomendasi DPRD
			3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		76,962,100	76,407,025			
			a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		76,962,100	76,407,025			
			B. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		348,824,784	348,824,784			
			I. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan		29,861,795	29,861,795			
			a. Belanja Tagihan Air		450,000	450,000			
			b. Belanja Tagihan Listrik		22,031,795	22,031,795			
			c. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		7,380,000	7,380,000			
			II. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		318,962,989	318,962,989			
			a. Belanja Honorarium Penangungjawaban Pengelola		34,320,000	34,320,000			
			b. Belanja Jasa Pengelolaan BMG yang Tidak		6,000,000	6,000,000			
			c. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		244,400,000	244,400,000			
			d. Belanja Jasa Pengolahan Sampah		500,000	500,000			
			e. Belanja Juran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		1,742,989	1,742,989			
			f. Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung		32,000,000	32,000,000			
			C. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		31,794,500	31,794,500			
			I. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan		22,382,000	22,382,000			
			a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		14,400,000	14,400,000			
			b. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan		7,982,000	7,982,000			
			II. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan		2,412,500	2,412,500			
			a. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga		4,993,000	4,993,000			
			b. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga		2,999,500	2,999,500			
			c. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-		730,000	730,000			
			d. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-		690,000	690,000			
			III. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		163,759,000	163,758,320			
			A. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		107,655,390	107,455,020			
			I. Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan		82,121,520	82,121,520			
			a. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman (DBH-DR)		54,024,165	54,024,165			
			b. Belanja Bahan-Bahan Lainnya (DBH-DR)		900,000	900,000			
			c. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan		22,100,000	22,100,000			
			d. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa		9,857,355	9,857,355			
			e. Belanja Perjalanan Dinas Biasa (DBH-DR)		440,000	440,000			
			f. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (DBH-DR)		1,800,000	1,800,000			
			II. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar		18,533,870	18,533,500			
			a. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman		6,400,000	6,400,000			
			b. Belanja Bahan-Bahan Lainnya (DBH-DR)		4,034,000	4,034,000			
			c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan		959,500	959,500			
			d. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan		7,140,370	7,140,000			
			B. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan		50,184,610	50,184,300			
			I. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan		50,184,610	50,184,300			
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		699,610	699,300			
			b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DBH-DR)		2,420,000	2,420,000			
			c. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan		765,000	765,000			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebijakan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjauan Rekomendasi DPRD
			d. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang (DBH-		1,500,000	1,500,000			
			e. Belanja Perjalanan Dinas		1,540,000	1,540,000			
			Belanja Perjalanan Dinas (DBH-DR)		7,260,000	7,260,000			
			f. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		6,300,000	6,300,000			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (DBH-DR)		29,700,000	29,700,000			
			C. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		5,919,000	5,919,000			
			I. Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak		5,919,000	5,919,000			
			a. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman		4,239,000	4,239,000			
			b. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		330,000	330,000			
			c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1,350,000	1,350,000			
			IV. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN		23,375,300	23,365,300			
			A. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan		23,375,300	23,365,300			
			I. Pengawatan dan Pendampingan Kelembagaan		19,913,450	19,913,450			
			a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		200,000	200,000			
			b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis		313,500	313,500			
			c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		534,950	534,950			
			d. Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1,100,000	1,100,000			
			e. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,		2,400,000	2,400,000			
			f. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		500,000	500,000			
			g. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		2,640,000	2,640,000			
			h. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		12,225,000	12,215,000			
			2. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial		3,461,850	3,461,850			
			a. Belanja Penggandaan		101,850	101,850			
			b. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		660,000	660,000			
			c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		2,700,000	2,700,000			
	UPT KPH TEPO ASA AROA				1,549,316,600	1,546,437,000			
	I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				211,106,600	211,106,600			
	A. Administrasi Umum Perangkat Daerah				53,076,600	53,076,600			
	I. Penyediaan Bahan Logistik Kantor				4,790,000	4,790,000			
	a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis				817,500	817,500			
	b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan				2,362,500	2,362,500			
	c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				510,000	510,000			
	d. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan				1,100,000	1,100,000			
	2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3,526,600	3,526,600			
	a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan				3,526,600	3,526,600			
	3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi				44,760,000	44,760,000			
	a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa				44,760,000	44,760,000			
	B. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				130,630,000	130,630,000			
	I. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan				20,560,000	20,560,000			
	a. Belanja Tagihan Telepon				8,460,000	8,460,000			
	b. Belanja Tagihan Listrik				12,100,000	12,100,000			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebijakan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjauan Rekomendasi DPRD
					110,070,000	110,070,000			
			2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		41,070,000	41,070,000			
			a. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola		6,000,000	6,000,000			
			b. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak		63,000,000	63,000,000			
			c. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum						
			C. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan.		27,400,000	27,400,000			
			1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan.		25,900,000	25,900,000			
			a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		9,900,000	9,900,000			
			b. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan		16,000,000	16,000,000			
			2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1,500,000	1,500,000			
			a. Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-		1,500,000	1,500,000			
			II. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		1,056,450,000	1,054,171,200			
			A. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		861,200,000	858,921,200			
			1. Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan		30,000,000	29,810,000			
			a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan		30,000,000	29,810,000			
			2. Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan.		9,600,000	9,600,000			
			a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		9,600,000	9,600,000			
			3. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara		821,600,000	819,511,200	Sisa Kegiatan Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman		200,000,000	199,188,000			
			Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman (DBH-DR)		570,000,000	568,723,200			
			b. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		51,600,000	51,600,000			
			B. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan		189,490,000	189,490,000			
			1. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan		189,490,000	189,490,000			
			a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		4,200,000	4,200,000			
			b. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		5,200,000	5,200,000			
			c. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan		850,000	850,000			
			d. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		2,000,000	2,000,000			
			e. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		44,640,000	44,640,000			
			f. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		132,600,000	132,600,000			
			C. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		5,760,000	5,760,000			
			1. Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak		5,760,000	5,760,000			
			a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		5,760,000	5,760,000			
			IV. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN		281,760,000	281,160,000			
			A. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan		281,760,000	281,160,000			
			1. Pengawatan dan Pendampingan Kelembagaan		68,640,000	68,640,000			
			a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		1,200,000	1,200,000			
			b. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		960,000	960,000			
			c. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		48,000,000	48,000,000			
			d. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		18,480,000	18,480,000			
			2. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial		213,120,000	212,520,000			
			a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		600,000	600,000			

NC	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebijakan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjauan Rekomendasi DPRD
			b. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman		198,000,000	197,400,000			
			c. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		480,000	480,000			
			d. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		14,040,000	14,040,000			
			UPT KPH TEPE ASA MOROSO		1,695,435,000	1,693,207,791			
	I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			516,090,900	516,987,691			
	A.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			107,794,135	106,893,741			
	1.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			10,689,750	10,689,750			
		a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis			1,540,000	1,540,000			
		b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan			5,309,750	5,309,750			
		c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan			3,840,000	3,840,000			
	2.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			5,053,400	5,053,400			
		a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan			5,053,400	5,053,400			
	3.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi			92,050,985	91,150,521			
		a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis			124,500	124,500			
		b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan			945,000	945,000			
		c. Belanja Perjalanan Dinas Biasa			90,981,485	90,081,091			
	B.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			337,296,765	337,093,950			
	1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan			25,541,750	25,541,750			
		a. Belanja Tagihan Listrik			14,381,950	14,381,950			
		b. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Bertanggungan			11,160,000	11,160,000			
	2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			311,754,815	311,552,000			
		a. Belanja Honorarium Penangungjawaban Pengeleta			42,620,000	42,620,000			
		b. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak			6,000,000	6,000,000			
		c. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan			32,400,000	32,400,000			
		d. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum			90,000,000	90,000,000			
		e. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan			32,400,000	32,400,000			
		f. Belanja Jasa Tenaga Keamanan			32,400,000	32,400,000			
		g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			432,000	432,000			
		h. Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung			35,000,000	35,000,000			
		i. Belanja Modal Alat Pendingin			5,051,072	5,000,000			
		j. Belanja Modal Personal Computer			35,451,743	35,300,000			
	C.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			71,000,000	71,000,000			
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan.			71,000,000	71,000,000			
		a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			26,000,000	26,000,000			
		b. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan			30,000,000	30,000,000			
		c. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan			15,000,000	15,000,000			
	II.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			631,539,200	630,415,200			
	A.	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			600,589,200	599,675,200			
	1.	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan			489,830,800	488,276,800			
		a. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman			199,075,800	199,075,800			
		b. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman (DBH-DR)			182,500,000	181,782,000			
		c. Belanja Bahan-Bahan Lainnya (DBH-DR)			10,615,865	10,615,865			

NC	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebijakan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjauan Rekomendasi DPRD
			d. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan		1,239,135	1,239,135			
			e. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan		71,400,000	71,400,000			
			f. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan		25,000,000	24,804,000			
			2. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar		110,758,400	110,758,400			
			a. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman (DBH-DR)		83,500,000	83,500,000			
			b. Belanja Bahan-Bahan Lainnya (DBH-DR)		11,645,000	11,645,000			
			c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan		2,013,400	2,013,400			
			d. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan		13,600,000	13,600,000			
			B. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan		30,950,000	30,740,000			
			1. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan		30,950,000	30,740,000			
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis		212,500	212,500			
			b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan		787,500	787,500			
			c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		29,950,000	29,740,000			
			IV. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN		547,804,900	547,804,900			
			A. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan.		547,804,900	547,804,900			
			1. Pengawatan dan Pendampingan Kelembagaan		348,731,900	348,731,900			
			a. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		99,772,500	99,772,500			
			b. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada		49,500,000	49,500,000			
			c. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman (DBH-DR)		199,459,400	199,459,400			
			2. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial		199,073,000	199,073,000			
			a. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman		199,073,000	199,073,000			
	UPT KPH GUNUNG DAKO				993,638,000	992,075,630			
	I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				469,817,400	469,271,625			
	A. Administrasi Umum Perangkat Daerah				45,963,282	45,963,282			
	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				38,369,157	38,369,157			
	a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik				1,456,667	1,456,667			
	b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan				1,912,490	1,912,490			
	c. Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung				35,000,000	35,000,000			
	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7,594,125	7,594,125			
	a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis				2,334,150	2,334,150			
	b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan				3,512,475	3,512,475			
	c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan				1,747,500	1,747,500			
	B. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				347,854,560	347,259,343			
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan				47,642,040	47,046,843			
	a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				1,000,000	1,000,000			
	b. Belanja Tagihan Air				1,882,700	1,824,975			
	c. Belanja Tagihan Listrik				35,360,028	34,830,868			
	d. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan				9,399,312	9,391,000			
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				300,212,500	300,212,500			
	a. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola				39,240,000	39,240,000			
	b. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak				6,000,000	6,000,000			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebijakan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjauan Rekomendasi DPRD
			c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		1,102,500	1,102,500			
			d. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan		30,430,000	30,430,000			
			e. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		176,400,000	176,400,000			
			f. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		18,000,000	18,000,000			
			g. Belanja Jasa Tenaga Keamanan		24,000,000	24,000,000			
			h. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		3,360,000	3,360,000			
			i. Belanja Jasa Pengiriman Surat		1,680,000	1,680,000			
			C. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		75,999,578	75,999,000			
			I. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan		75,999,578	75,999,000			
			a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		28,549,578	28,549,000			
			b. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan		47,450,000	47,450,000			
			II. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		394,748,100	394,099,900			
			A. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		360,833,100	360,184,900			
			I. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara		360,833,100	360,184,900	Sisa kegiatan Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman		299,270,950	298,650,000			
			b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis		1,678,550	1,651,300			
			c. Belanja Perjalanan Dinas Biasa (DBH-DR)		59,883,600	59,883,600			
			B. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan.		33,915,000	33,915,000			
			I. Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan		33,915,000	33,915,000			
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis		735,000	735,000			
			b. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan		3,400,000	3,400,000			
			c. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang (DBH-		6,000,000	6,000,000			
			d. Belanja Perjalanan Dinas Biasa (DBH-DR)		6,380,000	6,380,000			
			e. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (DBH-DR)		17,400,000	17,400,000			
			IV. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN.		129,072,500	128,754,105			
			A. Pelaksanaan Penyuluhan Kebutuhan Provinsi dan.		129,072,500	128,754,105			
			I. Penyiapan dan Pengembangan Perutinan Sosial		129,072,500	128,754,105			
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis		4,244,900	4,244,900			
			b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		450,000	450,000			
			c. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DBH-DR)		6,600,000	6,600,000			
			d. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		24,522,600	24,204,205			
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa (DBH-DR)		39,255,000	39,255,000			
			e. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (DBH-DR)		54,000,000	54,000,000			
			UPT KPH POGOGL		1,524,056,784	1,518,229,470			
			I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		420,929,344	417,911,206			
			A. Administrasi Umum Perangkat Daerah		130,955,694	128,165,967			
			I. Penyediaan Bahan Logistik Kantor		36,064,586	34,909,060	Sisa belanja Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		2,250,000	1,662,500			
			b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis		2,087,740	2,009,100			
			c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan		7,401,153	7,273,560			

NO	Urusan Pemerintah n	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebijakan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjauan Rekomendasi DPRD
			d. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		1,970,000	1,970,000			
			e. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan		5,834,400	5,834,400			
			f. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		877,833	848,050			
			g. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan		1,083,460	964,250			
			h. Belanja Makanan dan Minuman Rapat		13,200,000	13,192,000			
			i. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan		1,360,000	1,360,000			
			2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		5,724,628	5,723,150			
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		5,724,628	5,723,150			
			3. Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		89,166,480	87,532,957	Sisa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		83,966,480	82,332,957			
			b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		5,200,000	5,200,000			
			B. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		169,223,650	169,053,167			
			1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan		24,483,650	24,421,350			
			a. Belanja Tagihan Listrik		6,733,650	6,733,250			
			b. Belanja Kabel/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		17,750,000	17,688,100			
			2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		144,740,000	144,631,797			
			a. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola		27,620,000	27,620,000			
			b. Belanja Jasa Pengelolaan BMG yang Tidak		6,000,000	6,000,000			
			c. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		110,400,000	110,400,000			
			d. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		720,000	611,797			
			C. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		120,750,000	120,692,092			
			1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan		92,460,000	92,455,092			
			a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		15,800,000	15,795,992			
			b. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan		58,660,000	58,660,000			
			c. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan		18,000,000	18,000,000			
			2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		28,290,000	28,237,000			
			a. Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung		25,000,000	25,000,000			
			b. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-		1,830,000	1,830,000			
			c. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-		1,460,000	1,407,000			
			II. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		863,511,212	861,405,800			
			A. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan		13,730,000	13,730,000			
			1. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana		13,730,000	13,730,000			
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan		12,000,000	12,000,000			
			b. Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya		1,730,000	1,730,000			
			B. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali		8,649,092	8,610,000			
			1. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan		8,649,092	8,610,000			
			a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		1,400,000	1,400,000			
			b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DBH-DR)		1,680,000	1,650,000			
			c. Belanja Perjalanan Dinas Biasa (DBH-DR)		5,569,092	5,560,000			

NC	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebijakan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjauan Rekomendasi DPRD
			C. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		731,039,680	729,626,800			
			1. Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan.		473,282,680	472,339,725			
			a. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (DBH-DR)		5,577,600	5,577,600			
			b. Belanja Bahan-Bahan Kimia (DBH-DR)		9,006,425	9,006,425			
			c. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman		175,000,000	174,760,000			
			d. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman (DBH-DR)		143,180,000	142,900,000			
			e. Belanja Bahan-Bahan Lainnya (DBH-DR)		14,500,000	14,500,000			
			f. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		289,705	250,000			
			g. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan		833,750	833,750			
			h. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DBH-DR)		2,750,000	2,750,000			
			i. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,		1,800,000	1,800,000			
			j. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan		72,675,000	72,675,000			
			k. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan		15,000,000	14,985,000			
			l. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa		10,000,000	9,990,000			
			Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa		10,000,000	9,901,200			
			m. Belanja Perjalanan Dinas Biasa (DBH-DR)		4,620,000	4,510,000			
			n. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (DBH-DR)		8,050,000	7,900,000			
			2. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar		257,257,000	257,287,625			
			a. Belanja Bahan-Bahan Kimia (DBH-DR)		5,340,000	5,340,000			
			b. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman		199,875,000	199,406,625			
			c. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman (DBH-DR)		5,150,000	5,150,000			
			d. Belanja Bahan-Bahan Lainnya (DBH-DR)		6,402,000	6,401,000			
			e. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan		36,720,000	36,720,000			
			Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan		4,250,000	4,250,000			
			D. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan...		77,682,440	77,059,000			
			1. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan		77,682,440	77,059,000	Sisa Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Sisa anggaran tidak dicairkan (dikembalikan)	
			a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (DBH-DR)		1,200,000	1,200,000			
			b. Belanja Bahan-Bahan Lainnya		4,000,000	4,000,000			
			c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		530,000	500,000			
			d. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DBH-DR)		5,600,000	5,500,000			
			e. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,		4,300,000	4,300,000			
			f. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan		850,000	850,000			
			g. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang		500,000	500,000			
			h. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang (DBH-DR)		3,000,000	3,000,000			
			i. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		16,102,440	16,080,000			
			j. Belanja Perjalanan Dinas Biasa (DBH-DR)		8,800,000	8,685,000			
			k. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (DBH-DR)		32,800,000	32,444,000			
			E. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		32,410,000	32,380,000			
			1. Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak...		32,410,000	32,380,000			
			a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (DBH-DR)		1,950,000	1,950,000			
			b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DBH-DR)		3,880,000	3,850,000			
			c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (DBH-DR)		5,760,000	5,760,000			
			d. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman (DBH-DR)		2,270,000	2,270,000			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebijakan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjauan Rekomendasi DPRD
			e. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan		3,400,000	3,400,000			
			f. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian		8,350,000	8,350,000			
			g. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan		6,800,000	6,800,000			
			IV. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN.		239,616,228	238,912,464			
			A. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan.		239,616,228	238,912,464			
			I. Pengawatan dan Pendampingan Kelembagaan		231,409,000	230,793,464			
			a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (DBH-DR)		3,050,000	3,050,000			
			b. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman		198,000,000	197,400,000			
			c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis		2,184,000	2,181,464			
			d. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DBH-DR)		7,150,000	7,137,000			
			e. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		6,825,000	6,825,000			
			f. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,		3,600,000	3,600,000			
			g. Belanja Perjalanan Dinas Biasa (DBH-DR)		8,800,000	8,800,000			
			h. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (DBH-DR)		1,800,000	1,800,000			
			2. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial		8,207,228	8,119,000			
			a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (DBH-DR)		300,000	300,000			
			b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan		1,307,228	1,269,000			
			c. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DBH-DR)		4,450,000	4,400,000			
			d. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,		2,150,000	2,150,000			
			Jumlah		80,295,543,459,00	74,005,416,695,00			

Mengetahui,
**A DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

